



Bondowoso
Berkah
Berkualitas, Akseleratif, Holistik

Rencana Strategis

2025 - 2029



Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso

✉ Jl Imam Bonjol No. 13 Kab. Bondowoso 68217

☎ (0332) 42134

✉ perencanaanbondowoso@gmail.com

🌐 <https://dinkes.bondowosokab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 yang berpijak pada RPJMD Periode 2025 – 2029 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Dalam Rencana Strategis (Renstra) ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045.

Kami sepenuhnya menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk itu masukan dan saran

dari semua pihak terkait sampai diharapkan untuk dokumen penyusunan Rencana Strategis (Renstra) baik pada periode ini dan periode berikutnya.

Bondowoso, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bondowoso



Agus Winarno, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 198008 200312 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan	8
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan	8
2.1.2 Sumber daya Dinas Kesehatan	16
2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	17
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	32
2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan	33
2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan	33
2.2.2 Isu strategis Dinas Kesehatan	37
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029	44
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029	44
3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	46
3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	47
BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
4.1 Uraian Program	49
4.2 Uraian Kegiatan	55
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagi Indikatif	56
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.	58

4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 melalui IKU Dinas Kesehatan	59
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah melalui IKK	60
BAB V	PENUTUP	61

B A B I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral sekaligus sebagai modal utama dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan Kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah sampai dengan pusat melalui pengelolaan kesehatan yang disebut dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN mempunyai tujuan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Penyelenggaraan SKN memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.

Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab telah memberikan kesempatan yang luas pada daerah untuk berprakarsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga perkembangan pemerintahan dan laju pembangunan dapat ditingkatkan, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun dan dapat berubah apabila ada kondisi tertentu sebagai syaratnya.

Oleh karena itu agar penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan kesehatan berjalan seiring dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan bukan kegiatan yang bediri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan diawali dengan menganalisa kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso selama jangka waktu sebelumnya. Hasil analisa ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Jawa Timur, serta Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 telah disusun. Selanjutnya diharapkan semua komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat memanfaatkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso.

1. 2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan berpedoman dan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

- 2024 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 132);
 21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69); dan
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 8).
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 74)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai acuan dan

pedoman dalam merencanakan kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso. Hal ini dilakukan dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 yang masih bersifat indikatif diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah serta perkembangan kondisi masyarakat. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2025 – 2029
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kesehatan Kabupaten Bondowoso baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan di bidang Kesehatan.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik dalam mencapai prioritas daerah di bidang Kesehatan.
6. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.
7. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan
 - 2.1.2 Sumber daya Dinas Kesehatan
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan
 - 2.2.2 Isu strategis Dinas Kesehatan

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
- 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 melalui IKU Dinas Kesehatan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah melalui IKK

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso, dimana dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di Lapangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, maka kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesehatan serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

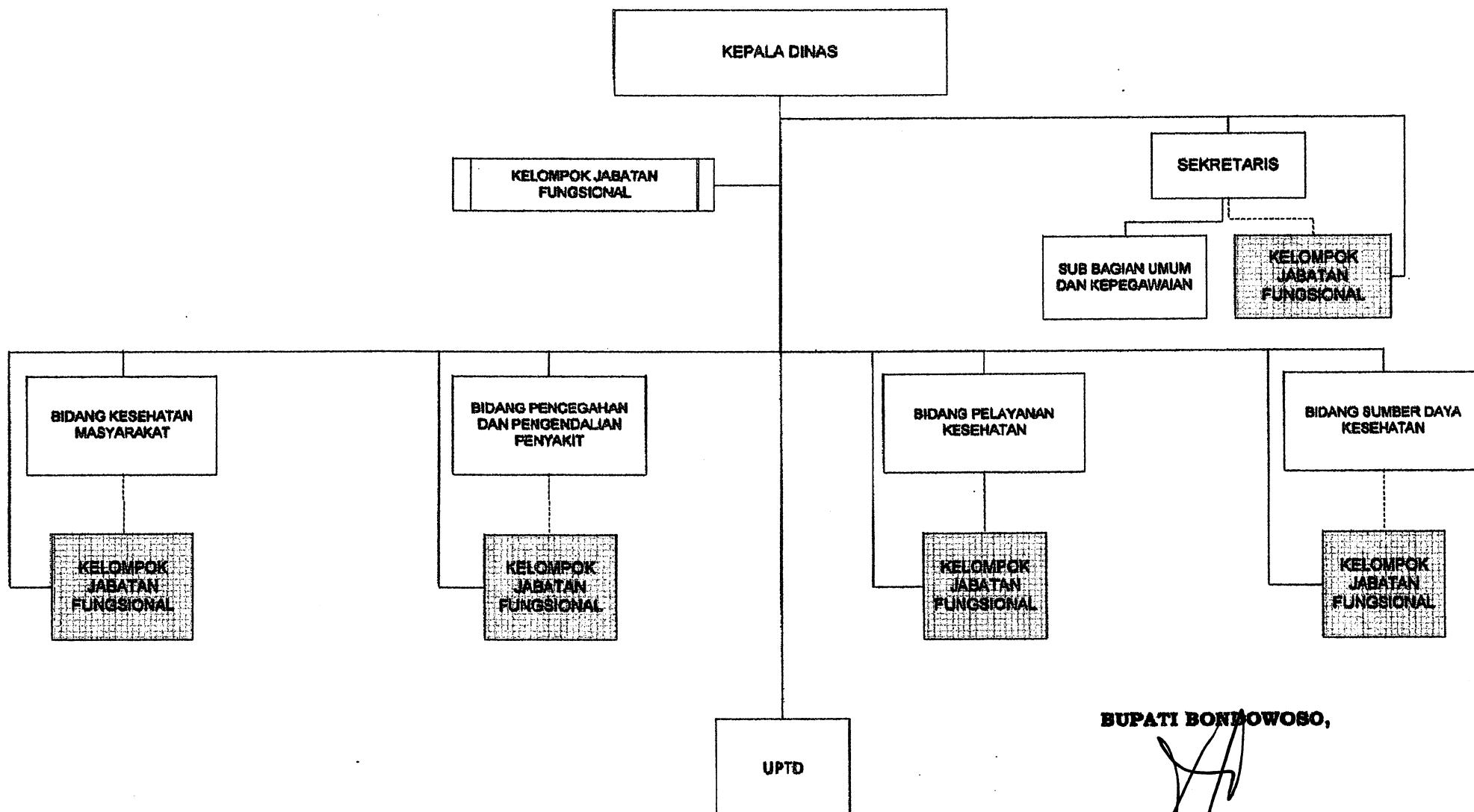
- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau/ unit kerja lain;
- g. Pelaporan kinerja Dinas;

- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pembinaan petunjuk teknis yang diperlukan instansi dan/atau unit kerja lain;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 139 Tahun 2021 seperti dalam bagan di bawah ini:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN

Dalam struktur organisasi, Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada dinas kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Koordinator Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - a. Sub Koordinator Kefarmasian;

- b. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Puskesmas dan
9. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
11. Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
12. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berikut ini penjabaran dari tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Bagian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021:

1. Bagian Sekretariat
 - a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - 3) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - 4) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - 6) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Koordinator Perencanaan , Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan,
 - 2) Sub Koordinator Keuangan dan Pengelolaan Aset, dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
- a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengelola kegiatan perencanaan umum dan perencanaan teknis bidang kesehatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
 - 5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,
- 2) Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- 3) Sub Koordinator Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum, pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;

- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi,
- 2) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
- 3) Sub Koordinator Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum, pengorganisasian, dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
 - 5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
 - 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
- 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan primer,
 - 2) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan rujukan, dan
 - 3) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum, pengorganisasian, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sumber Daya Kesehatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Kefarmasian
- 2) Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga
- 3) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.1. 2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

1. Personil

Data terakhir yang diperoleh di Kabupaten Bondowoso sebagai gambaran hasil pendataan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD (Puskesmas, GFK, Labkesda) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Pejabat Struktural	4
2	Dokter	67
3	Dokter Gigi	38
4	Perawat	595
5	Bidan	541
6	Terapis Gigi dan Mulut	6
7	Teknis Elektromedis	1
8	Nutrisionis	41
9	Sanitarian	29
10	Pranata Labkes	38

No	Jenis Tenaga	Jumlah
11	Asisten Apoteker	24
12	Apoteker	22
13	Penyuluhan Kesmas	43
14	Staf Admin Penunjang	362
15	Staf lainnya (juru)	38
	Jumlah	1.849

2. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	
	a. Puskesmas Perawatan	25
	b. Puskesmas Non Perawatan	0
2	Puskesmas Keliling	25
3	Puskesmas Pembantu	63
4	RSUD	1
5	RS Bhayangkara	1
6	RS Swasta	2
7	Gudang Farmasi Kabupaten	1
8	Apotik	67
9	Labkesda	1

3. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

No	Jenis UKBM	Jumlah
1	Posyandu	1.104
2	Ponkesdes	157

2.1. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan melalui beberapa indikator pelayanan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen

Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.

4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Di Kabupaten Bondowoso cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tahun ketahun mengalami kenaikan, tapi di bandingkan dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Bondowoso masih terendah, Rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bondowoso dapat disebabkan karena banyak faktor yang melibatkan berbagai peran stakeholder, baik terkait kesehatan dan di luar urusan kesehatan atau lintas sektor, misalnya penyediaan sarana prasarana penunjang akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan, tingkat perekonomian masyarakat, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Jalan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan begitu terbatas. Masih terdapat wilayah di Bondowoso yang tidak memiliki akses jalan beraspal dan sulit untuk mencari angkutan umum. Kondisi ini pula mewakili faktor tempat tinggal masyarakat Bondowoso yang terpencar di berbagai pelosok wilayah Bondowoso.

Terkait tingkat perekonomian masyarakat, persentase penduduk masyarakat miskin di Bondowoso adalah sebesar 12,60 persen atau sekitar seratus ribu orang lebih. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Timur (sebesar 9,56 persen). Kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk di Bondowoso menyebabkan mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Keterbatasan masyarakat miskin tidak hanya terhadap pembiayaan pelayanan tapi pada kondisi psikis masyarakat yang menyebabkan mereka untuk memutuskan tidak mencari pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data dari Kantor BPJS Kabupaten Bondowoso cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ada penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, cakupan kepesertaan JKN telah meningkat sebesar 1,93 dan ada penurunan sebesar 1,3.

Tabel Capaian Kepesertaan JKN dan Kepesertaan Aktif JKN

Indikator	Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2025)
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	85,8	84,5	97,55	99,48	98,94	98,94
Cakupan kepesertaan JKN yang aktif	0	0	72,19	76,45	76,55	76,55

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bondowoso antara lain meningkatkan capaian target program bidang kesehatan dengan melanjutkan kegiatan inovasi yang sudah ada dan melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan jaringan antar stakeholder. Selain itu, perlu adanya upaya mendapatkan berbagai sumber dana guna optimalisasi kegiatan hingga mencapai ke masyarakat yang berada di pelosok wilayah Bondowoso. Dengan memperluas sasaran kegiatan diharapkan dapat mendorong meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal .

B. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan terdiri dari tiga puluh enam indikator. Realisasi dan capaian kinerja tiga puluh enam sasaran pada tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci	Target					Realisasi					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100	94,86	99,22	100	97,5	100%	95%	99%	100%	98%
2	Cakupan penemuan kasus TB	80	80	90	90	90	52,4	60,4	78,2	94,5	74,4	66%	76%	87%	105%	83%
3	Percentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	95,09	95,56	100	100	95,58	95%	96%	100%	100%	96%
4	Percentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Percentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	91,93	95,88	96,22	94,53	75,35	92%	96%	96%	95%	75%
6	Percentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masvarakat	0	0	0	0	0,009	0	0	0	0	0,009	0%	0%	0%	0%	100%
7	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
8	Percentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	0	0	0	100	100	0	0	0	40	100	0%	0%	0%	40%	100%
9	Percentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0	0	100	100	100	0	0	65,3	68,72	68,2	0%	0%	65%	69%	68%
10	Percentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
11	Percentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	99,12	100	100	99,36	77,08	99%	100%	100%	99%	77%
12	Percentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	85,86	87,69	84,86	82,06	62,56	86%	88%	85%	82%	63%
13	Percentase Laporan Keuangan yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Percentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100	100	100	100	100	44,81	44,69	46,96	47,45	47,8	45%	45%	47%	47%	48%

15	Percentase merokok penduduk 10-21 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
16	Percentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	97,64	100	100	100	98%	100%	100%	100%	100%	
17	Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	99,51	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Percentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	63,57	61,22	100	100	64%	61%	100%	100%	100%	
19	Percentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	63,57	61,22	100	100	64%	61%	100%	100%	100%	
20	Percentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	67	69	71	73	75	61	63	65	66	69	91%	91%	92%	90%	92%
21	Percentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	86,6	88,33	100	100	100	87%	88%	100%	100%	100%
22	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	15,22	16,53	19,66	83,8	100	15%	17%	20%	84%	100%
23	Percentase penerbitan dan pemenuaan komitmen SPP - IRT sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
24	Percentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	80	80	82	82	85	80	80	82	85	85	100%	100%	100%	104%	100%
25	Percentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Percentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Percentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Percentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	

29	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0	0	100	100	100	0	0	72,19	76,45	76,55	0%	0%	72%	76%	77%
30	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	82	84	83	86	100	81,32	91,75	72,5	83,33	58	99%	109%	87%	97%	58%
31	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	11	12	13	14	15	21,01	22,09	23,19	24,29	25,39	191%	184%	178%	174%	169%
32	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	36,04	32,71	65,9	71,25	82,38	36%	33%	66%	71%	82%
33	Presentase lanjut usia yang mandiri	0	0	0	50	50	0	0	0	14,4	19,6	0%	0%	0%	29%	39%
34	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
35	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	0	0	0	0	23,4	0	0	0	0	85	0%	0%	0%	0%	363%
36	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	0	0	0	0	76,61	0	0	0	0	100	0%	0%	0%	0%	131%

Ada beberapa indikator sasaran pada tahun 2024 yang baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) yang sebelumnya tidak masuk dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, ada beberapa indikator sasaran telah mencapai target indikator sasaran. Hal tersebut merupakan hasil kerja seluruh Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Ada beberapa indikator sasaran yang belum memenuhi target.

1) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Cakupan pelayanan kesehatan pada balita masih belum bisa mencapai target dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu adanya balita tidak datang keposyandu, Ponkesdes, dan Puskesmas di karenakan adanya daerah dengan Geografi sulit, Orang tua bekerja sehingga tidak ada yang mengantar, balita sekolah PAUD/TK di luar wilayah.

2) Cakupan penemuan kasus TB

Cakupan penemuan kasus tuberculosis (TB) ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

3) Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Presentase untuk anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih belum memenuhi target dikarenakan sasaran KMK lebih tinggi dari pada riil, dan banyak anak usia pendidikan dasar yang sekolah diluar wilayah tersebut, begitu pula dengan puskesmas yang melebihi target bahkan jauh lebih besar dari pada target karena banyak anak usia sekolah yang dari luar wilayah sekolah di wilayah lain sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pada usia pendidikan dasar.

4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar masih belum memenuhi target dikarenakan kenaikan sasaran,

Permasalahan di Kabupaten Bondowoso pada 2024 Tingginya komplikasi pada neonatus 1210 Bayi Baru Lahir dan adanya persalinan dengan SC 2691 ibu sehingga ada Bayi Baru Lahir tidak dilakukan IMD.

- 5) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 6) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 7) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar masih belum memenuhi standar dikarenakan adanya kenaikan sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025 ada kenaikan 2440 (19,95%).

- 8) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar masih belum mencapai target ini dikarenakan adanya kenaikan sasaran sesuai KMK penduduk sasaran terbaru, Ibu hamil Abortus sampai Desember 407 ibu hamil, Bayi Baru Lahir Prematur 382 bayi baru lahir, adanya budaya di kabupaten Bondowoso Ibu Hamil memeriksakan kehamilan ketika umur kehamilan lebih dari 3 bulan, adanya Geografi yang sulit sehingga ibu hamil tidak melakukan

ANC Terpadu 2 kali selama masa kehamilan. Puskesmas Sempol tidak memiliki Dokter umum untuk melakukan USG, sehingga pemeriksaan USG di Puskesmas Pujer.

- 9) Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan.
Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029..
- 10) Persentase merokok penduduk 10 – 21 tahun.
Persentase merokok penduduk 10 – 21 tahun ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.
- 11) Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu.
Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu belum memenuhi target ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.
- 12) Persentase penerbitandan pemenuhan komitmen SPP – IRT sesuai standar.
Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP – IRT sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.
- 13) Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum memenuhi target, kepesertaan aktif ini di peruntukan bagi masyarakat yang ikut BPJS/KIS yang masyarakat yang bayar iuran mandiri. Kesadaran Masyarakat masih kurang tentang penting keaktifan mereka untuk bayar iuran tepat waktu, sementara ini Masyarakat bayar/mengaktifkan kalau mereka membutuhkan layanan kesehatan saja.

14) Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan.

Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan ini masih dibawah target dikarenakan masih ada sebagian pelaku usaha IRTP yang belum memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku.

15) Persentase warga negara usia 60 tahun keatas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar.

Persentase warga negara usia 60 tahun keatas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

16) Persentase lanjut usia yang mandiri

Persentase lanjut usia yang mandiri ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

17) Prevalensi depresi umur lebih dari 15 tahun.

Prevalensi depresi umur lebih dari 15 tahun ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

C. Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengalami perubahan dengan adanya Permenkes Nomor 43 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan SPM Dinas Kesehatan sejak tahun 2017 menjadi lebih sedikit, yakni 12 indikator. Berikut merupakan capaian SPM pada tahun terakhir (2024):

NO	NAMA INDIKATOR	HASIL/REALISASI	TARGET/SASARAN	CAPAIAN (%)	TARGET SPM Nasional
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	62,56	100%	62,6	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	77,08	100%	77,1	100%

NO	NAMA INDIKATOR	HASIL/REALISASI	TARGET/SASARAN	CAPAIAN (%)	TARGET SPM Nasional
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	75,35	100%	75,3	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	97,52	100%	97,5	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	95,58	100%	95,6	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100%	100	100%
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	82,38	100%	82,3	100%
8	Pelayanan tekanan darah tinggi di wilayah puskesmas	100	100%	100	100%
9	Pelayanan Diabetes Melitus di wilayah puskesmas	100	100%	100	100%
10	Pelayanan gangguan jiwa di wilayah Puskesmas	109,97	100%	110	100%
11	Pelayanan orang dengan TB di wilayah Puskesmas	119,16	100%	119,2	100%
12	Pelayanan orang dengan risiko HIV di wilayah Puskesmas	116,91	100%	117	100%

Uraian diatas menunjukkan bahwa dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bondowoso ada 4 indikator yang masih belum mencapai target Nasional (100 %) dikarenakan beberapa permasalahan dan solusi sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kasus kematian ibu dan bayi. Kesadaran untuk memeriksakan kehamilan pada trimester I (3 bulan pertama kehamilan) masih kurang. Beberapa penyebab utama dari rendahnya kunjungan bumil K-4 adalah cakupan K-1 akses yang rendah, terjadinya abortus prematur, kemudian ada beberapa kasus KTD (kehamilan tidak dikehendaki) sehingga menyebabkan ibu mengambil keputusan untuk

tidak periksa. Mobilisasi Bumil masih tinggi, Kurangnya koordinasi antara BPM dan Bidan wilayah sehingga pencatatan bumil sering terlambat atau terlewati, Masih ada budaya menyembunyikan kehamilan, Masih ada kehamilan yang tidak di inginkan, Terdapat 395 kasus Abortus, Persalinan Prematur 333 kasus, untuk rencana tindak lanjut dalam kegiatan ini ibu camat melalui lembaga PKK untuk meningkatkan kunjungan antenatal empat kali (K4).

- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya persalinan yang dilaksanakan di Pustu, Ponkesdes dan rumah pasien sedangkan dalam SPM persalinan harus dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan yaitu Puskesmas atau Bidan Praktek Mandiri.
- 3) Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir masih belum mencapai target 100 % Rendahnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain syarat Syarat layanan KN Lengkap tidak terpenuhi, terutama IMD, karena masih tingginya kejadian komplikasi neonatal pada bayi, sebanyak 8802 kasus, Tidak semua bayi yang lahir di RS di IMD, Masih ada kematian Neonatus.
- 4) Capaian pelayanan kesehatan balita yang rendah kurang dari 100% dari target, ini berhubungan dengan adanya Balita tidak datang keposyandu, Ponkesdes, dan Puskesmas di karenakan adanya daerah dengan Geografi sulit, Orang tua bekerja sehingga tidak ada yang mengantar, Balita sekolah PAUD/TK di luar wilayah.
- 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar masih rendah kurang dari 100%. Hal ini disebabkan sasaran KMK lebih tinggi dari pada riil, dan banyak anak usia pendidikan dasar yang sekolah diluar wilayah tersebut, begitu pula dengan puskesmas yang melebihi target bahkan jauh lebih besar dari pada target karena banyak anak usia sekolah yang dari luar wilayahb sekolah di wilayah lain sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- 6) Pelayanan kesehatan usia lanjut masih belum mencapai target 100% dikarenakan tidak adanya alat laboratorium sederhana untuk menunjang kegiatan pelayanan skrening kesehatan pada usia lanjut,kegiatan skrening kesehatan pada lanjut usia.

Kajian Sustainable Development Goals (SDGs) Indikator Kajian Sustainable Development Goals (SDGs) yang terkait dengan Dinas Kesehatan terdiri dari 23 indikator. Banyak dari indikator KLHS yang mirip dengan indikator-indikator sebelumnya. Meski begitu, masih terdapat indikator dalam KLHS yang tidak masuk ke dalam target renstra. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian target dengan berdasarkan pada kondisi yang ada atau target yang serupa. Namun, masih terdapat banyak dari indikator yang tidak memiliki target. Secara umum indikator KLHS mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indikator KLHS yang masih tidak mencapai target adalah persentase penduduk miskin yang tercakup dalam Program JKN. Secara umum, Dinas Kesehatan selalu berupaya untuk melakukan integrasi antara Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan JKN dengan BPJS. Selain itu, demi mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Dinas Kesehatan juga melakukan *update*/ perbaharuan data masyarakat miskin. Namun, dengan adanya fluktuasi pada data PBI JKN dan data masyarakat miskin, maka capaian juga turut mempengaruhi. Meski begitu pada tahun 2023 capaian persentase penduduk miskin yang tercakup dalam JKN sudah mencapai lebih dari 100%.

D. Perkembangan Tingkat Capaian Kinerja Program

Program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun terakhir (2024) terdiri dari 5 Program. Secara garis besar, beberapa indikator program telah dapat dicapai, namun masih ada beberapa capaian program yang belum tercapai, berikut merupakan rincian beberapa capaian program Dinas Kesehatan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut :

Berdasarkan penyampaian diatas dapat diketahui bahwa beberapa indikator program telah dapat dicapai, namun masih ada beberapa capaian program yang belum tercapai, berikut merupakan latar belakang kondisi yang dapat berpengaruh pada ketidaktercapaian program :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil dan persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir masih perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kasus kematian ibu dan bayi. Rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain mobilisasi Bumil masih tinggi, kurangnya koordinasi antara Bidan Praktek Mandiri dan Bidan wilayah sehingga pencatatan bumil sering terlambat atau terlewati, masih ada budaya menyembunyikan kehamilan, kunjungan rumah bidan pemegang wilayah masih kurang.

Rendahnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain syarat layanan yang tidak terpenuhi, terutama IMD. Selain itu, masih tingginya kejadian komplikasi neonatal pada bayi, sebanyak 8802 kasus, serta tidak semua bayi yang lahir di RS di IMD. Rendahnya pelayanan kesehatan balita disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain definisi operasional SPM yang baru masih belum dipahami, pencatatan dan pelaporan belum maksimal, balita tidak datang ke posyandu (kurang dari 8 x penimbangan dalam 1 tahun), medan sulit, ada bayi yang tidak di imunisaasi lanjutan(menolak imunisasi), mobilitas balita tinggi (terutama daerah perkotaan).

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar juga masih belum mampu mencapai target dikarenakan adanya perubahan definisi operasional pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan jumlah sasaran yang menjadi semakin besar karena semua siswa setingkat SD dan SMP harus mendapatkan pelayanan.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rendahnya capaian dari pelayanan kesehatan penderita tekanan darah tinggi/ hipertensi; pelayanan kesehatan penderita hipertensi berhubungan dengan kunjungan pasien/penderita ke puskesmas juga masih rendah. Sedangkan ketidak tercapaian indikator terkait penyakit menular disebabkan oleh berbagai macam kondisi. Sedangkan, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV disebabkan oleh kunjungan rumah pada kasus positif sempat terhenti sehingga memutus informasi untuk melakukan konseling pada kelompok kunci.
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Cakupan kunjungan rawat jalan dan kunjungan rumah tidak mencapai target dikarenakan kurang kesadaran masyarakat untuk kegiatan skrening kesehatan bila tidak ada keluhan.
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tidak tercapainya persentase sarana kefarmasian sesuai standar disebabkan oleh masih Adanya indikator penilaian sarana kefarmasian yang tidak tercapai baik dari segi srama maupun prasarana ataupun dari segi pelayanan kefarmasian. Persentase fasilitas IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) sesuai standar belum tercapai dikarenakan tidak ada pengajuan berkas, berkas tidak lengkap atau IRTP tidak memenuhi syarat baik dari segi hygiene sanitasi atau indikator lainnya.
5. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Indikator terkait kompetensi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui kewajiban kepemilikan STR (Surat Tanda Registrasi) bagi tenaga kesehatan. Ada beberapa tenaga kesehatan yang belum memenuhi SKP untuk Registrasi STR Aplikasi Online di KTKI sering mengalami gangguan dan ada peraturan yang berubah mengikuti Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
Selain ada beberapa indikator program yang masih belum mencapai target pada tahun 2024, ada pula indikator program yang telah mampu

mencapai target, bahkan melebihi target. Adapun indikator program yang telah mencapai dan melebihi target pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan peserta KB aktif melebihi target karena masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitas. Pelayanan kesehatan ibu bersalin telah mencapai target karena sudah optimalnya kinerja tenaga kesehatan serta peran serta stakeholder yang semakin nyata. Peran optimal dari masyarakat bahwa ibu hamil dan bayi memerlukan perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Persentase balita stunting (pendek dan sangat pendek), persentase posyandu mandiri, rumah tangga sehat, persentase akses jamban dan akses air bersih, serta pembentukan dan pembinaan Pos UKK Binaan di wilayah kerja Puskesmas telah mencapai target karena sudah optimalnya kinerja tenaga kesehatan serta peran serta stakeholder yang semakin nyata.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini) Kejadian Luar Biasa dan persentase desa/ kelurahan Universal Child Imunization (UCI) telah mencapai target karena setiap kejadian luar biasa yang terjadi akan selalu mendapat penanganan utama agar cepat teratasi, begitu pula dengan imunisasi. Persentase penyelenggaraan pemeriksaan jamaah haji telah mencapai target dikarenakan semua jamaah haji wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan agar selama pelaksanaan ibadah haji kesehatan para jamaah terjamin. Persentase imunisasi dasar lengkap bayi melebihi target karena jumlah bayi yang ada lebih banyak dari sasaran dari pusdatin. Pelayanan kesehatan pada usia produktif mampu mencapai target, bahkan melebihi target. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan definisi operasional sesuai dengan Permenkes 04 Tahun 2019, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan lebih sederhana daripada pelayanan kesehatan pada tahun sebelumnya. Pelayanan Diabetes Melitus di wilayah puskesmas dapat melebihi target karena adanya penurunan target di tahun 2019. Penghitungan target didasarkan pada estimasi

prevalensi Diabetes Melitus Kabupaten Bondowoso (sebesar 2% dari penduduk usia \geq 15 tahun). Estimasi prevalensi tersebut berdasarkan Riskesdas 2018. Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate) telah melebihi target karena adanya kedisiplinan yang baik dari para penderita serta dukungan moril dari keluarga. Cakupan Incidence Rate DBD telah mencapai target, karena insiden DBD berhasil ditekan dengan fogging dan pembasmian jentik nyamuk melalui kader PSN.

3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan tradisional telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase penduduk miskin yang tercakup dalam JKN, persentase rumah sakit dan klinik utama yang memiliki ijin, persentase rumah sakit rujukan yang berfungsi sesuai standar, persentase laboratorium klinik yang memiliki ijin, dan persentase rumah sakit terakreditasi telah mencapai target. Persentase Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresure, serta persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional dapat mencapai target karena semakin banyaknya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan untuk petugas puskesmas tentang kesehatan tradisional.

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, dan persentase fasilitas IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) sesuai standar telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Cakupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dapat melebihi target karena petugas medis telah mampu menganalisis kebutuhan obatnya.

5. Program Pemberdayaan SDM Kesehatan

Persentase puskesmas yang memiliki tenaga strategis telah tercapai. Hal ini didukung dengan adanya alokasi tenaga kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program Nusantara Sehat. Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan strategis di puskesmas

dapat terpenuhi melalui adanya tenaga kesehatan dari pengadaan CPNS dan P3K Tahun 2024.

6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tercapainya persentase sarana kesehatan (kendaraan roda 4) sesuai standar disebabkan oleh adanya Pengadaan sarana kesehatan (kendaraan roda 4) selalu diupayakan setiap tahunnya melalui berbagai sumber dana yang ada. Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sudah melebihi target dikarenakan seluruh petugas penanggung jawab alat kesehatan di puskesmas telah memasukkan data alat kesehatan, baik yang dalam kondisi baik maupun tidak. Akibat kondisi tersebut, maka data alat kesehatan dapat melebihi dari target jumlah standarnya, yakni alat kesehatan baik yang berfungsi baik atau tidak berfungsi. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, dan cakupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dapat melebihi target karena petugas medis telah mampu menganalisis kebutuhan obatnya.
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Indikator persentase sarana kesehatan yang memanfaatkan dana cukai telah memenuhi target. Adanya pendanaan kesehatan bersumber cukai yang nominalnya cukup besar, mampu dimanfaatkan untuk 15 sarana kesehatan melalui perbaikan puskesmas, puskesmas pembantu, dan pengadaan ambulan.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan, kenaikan anggaran dari tahun ke tahun dengan memperhatikan rasio antara realisasi dan anggaran yang baik sesuai progress pelaksanaan program.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan pada dinas kesehatan yaitu langsung kepada Masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah :

1. Rendahnya Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Rendahnya cakupan kepesertaan JKN dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor bidang kesehatan dan non-kesehatan. Multi faktor dari cakupan kepesertaan JKN menyebabkan upaya untuk peningkatannya membutuhkan campur tangan non kesehatan. Faktor ekonomi, budaya, dan sarana prasarana terkait akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh besar.

2. Tingginya Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah salah satu indikator dari derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Bondowoso dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024 Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan kembali. Kondisi ini disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Upaya pelayanan kesehatan ibu hamil harus tetap menjadi prioritas masalah yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

3. Tingginya Angka Kematian Bayi

Angka kematian Bayi di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan namun pada

tahun 2024 kembali mengalami kenaikan sehingga upaya pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita harus tetap menjadi prioritas masalah yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Sebenarnya banyak faktor yang berperan dalam angka kematian bayi baru lahir seperti bayi lahir prematur, pernikahan usia dini, jumlah kehamilan yang terlalu banyak, dan lainnya. Kemudian ternyata ada faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu faktor budaya. Permasalahan kematian ibu dan bayi memiliki penyebab yang kompleks, sehingga upaya penurunannya memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor seperti profesional di bidang kesehatan, pemerintah, dan masyarakat.

4. Tingginya angkanya Stunting

Usia Harapan Hidup (UHH) yang rendah juga dipengaruhi oleh cakupan kepesertaan JKN di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk status gizi masyarakat yang menjadi perhatian penting adalah status gizi pada Ibu Hamil dan Balita. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan.

5. Penerapan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)

Sejak dilaksankannya SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) maka seluruh masyarakat di Indonesia diharapkan mendapat perlindungan kesehatan berupa JKN. Kabupaten Bondowoso sudah mampu memberikan kontribusi terbaik terkait integrasi Jamkesda. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Meski begitu, capaian ini perlu dipertahankan melalui upaya berkesinambungan yakni penanggungan masyarakat miskin yang tidak

tercakup JKN di Kabupaten Bondowoso agar Universal Health Coverage (UHC) benar-benar dapat tercapai.

6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

Kondisi masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk disuatu daerah, karena selain kondisi lingkungan yang buruk perilaku merupakan faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten Bondowoso yang masih sering terjadi seperti masih cukup tingginya kasus penyakit menular seperti antara HIV/AIDS, Demam berdarah Dengue, Malaria lintas batas, Leptospirosis, TBC maupun penyakit tidak menular seperti antara lain Diabetes melitus, Stroke, Jantung.

7. Rendahnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya

Adanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadai merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dibandingkan penduduk diharapkan 10: 100.000 penduduk. Kondisi sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 3,37 : 100.000 penduduk yang artinya adalah setiap 1 (satu) Puskesmas melayani penduduk 31.029 penduduk. Puskesmas Pembantu mempunyai rasio 8,51: 100.000 penduduk. Fakta ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan membutuhkan layanan segera dalam menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Keterbatasan sarana prasarana disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan hambatan manajemen untuk pembangunan, serta kondisi geografis yang menyulitkan akses fisik pelayanan kesehatan.

8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman

Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi

kesehatan lingkungan di Kabupaten Bondowoso masih belum menggembirakan. Perwujudan kesehatan individu dan masyarakat tidak terlepas dari sanitasi lingkungan yang baik. Sedangkan Kabupaten Bondowoso masih menghadapi tantangan besar terkait sanitasi lingkungan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bondowoso terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang sanitasi masih sangat besar. Yang dimaksud akses sanitasi (jamban) adalah banyaknya masyarakat yang tidak buang air besar di sembarang tempat. Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat sebesar 75,59 % Perilaku masyarakat yang sudah tidak buang air besar di sembarang tempat dinamakan ODF (Open Defecation Free / Bebas dari Buang Air Besar Sembarang). Padahal pada tahun 2019, seluruh wilayah di Indonesia ditargetkan untuk 100% akses sanitasi jamban (*universal acces*)

9. Rendahnya status kesehatan masyarakat (Gizi)

Kondisi gizi masyarakat khususnya pada balita mempunyai kecenderungan semakin membaik. Status gizi masyarakat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan status kesehatan masyarakat. Balita Gizi Buruk pada Tahun 2013 sebesar 1,85% menurun pada tahun 2019 menjadi 1,33%. Walaupun demikian masalah gizi tetap menjadi ancaman dan menjadi perhatian karena Kabupaten Bondowoso menurut hasil SSGI 2024 persentase stunting mencapai 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi anak harus diperhatikan mulai dalam kandungan sampai berumur dua tahun yang biasa disebut sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan.

10. Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masalah utama yang harus segera ditangani adalah masih tingginya penyakit penyakit infeksi/ menular di masyarakat walaupun kecenderungannya semakin menurun/ membaik dibandingkan dengan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, stroke dan penyakit jantung yang cenderung meningkat, sehingga tetap masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi/menular seperti penyakit tuberkulosis paru (TBC), Malaria, ISPA, Pneumonia, Kusta, Lepostrirosis, Diare, dan penyakit menular lainnya masih menjadi

masalah serius yang harus ditangani dan dikendalikan secara komprehensif dengan keterlibatan berbagai program dan sektor. Pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit haruslah ditangani secara tepat. Penguatan survailance penyakit untuk deteksi dini timbulnya suatu penyakit dalam rangka untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Sistem informasi yang tepat dengan semua pemegang kepentingan menjamin penanganan dini, cepat, dan tepat.

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti Polio, Campak, TBC, Diphtheria, Tetanus dan Pertusis, capaiannya secara kuantitas menunjukkan telah diatas 80%, namun secara kualitas masih perlu diperbaiki. Pengelolaan *cold chain* menjamin ketersediaan kualitas vaksin dan kesinambungan logistik yang dapat dipertanggung jawabkan. *Safe injection* menjamin terhindarnya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), keamanan bagi provider dan masyarakat secara luas, lebih khusus terbentuknya imunitas bagi sasaran imunisasi.

11. Kurangnya Rumah Sakit yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Wilayah Kabupaten Bondowoso hanya memiliki satu rumah sakit milik pemerintah daerah (RSD) itupun letaknya diwilayah kota, sedang masyarakat Bondowoso sebagian besar hidup dipelosok/dipedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dengan kondisi saat ini berbagai keluhan kesehatan masyarakat yang sangat komplek dan sangat perlunya penanganan kesehatan lanjutan yang cepat, tepat dan berkoperten.

2. 2. 2. Isu Strategis Dinas Kesehatan

Berdasarkan analisis dari isu strategis di tingkat global, nasional dan regional serta dengan mempertimbangkan telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, dan Renstra Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada saat ini sampai pada lima tahun mendatang. Berdasarkan dari analisis tersebut

maka Dinas Kesehatan dapat menggunakan teknik menyimpulkan isu strategis daerah dapat dilihat di Tabel 2.1

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masalah kesehatan	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Infrakstruktur belum memadai	Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju	Kebijakan penggunaan produksi dalam negeri bagi sarana dan prasarana kesehatan	Tingginya kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terakomodir	Pemenuhan sarana dan prasarana menggunakan sumber daya yang tersedia dan penyediaan Rumah Sakit Daerah di wilayah perbatasan.
	Ketersediaan SDM pelayanan kesehatan yang terbatas	Rendahnya kualitas SDM	Tuntutan SDM pelayanan kesehatan yang semakin tinggi	Tersedianya portal untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan	Pelatihan dan pendidikan bagi petugas pelayanan kesehatan secara bertahap	Peningkatan kualitas SDM pelayanan kesehatan secara berkala
	Tingginya beban biaya pelayanan kuratif masyarakat dengan masalah kesehatan	Masih adanya masyarakat miskin	Amanat SDG untuk kesehatan untuk semua	Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) yang merata	Pemerintah daerah telah membuat kebijakan yang mendukung UHC	Pemanfaatan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Tingginya angka kesakitan penyakit menular	Tingginya potensi bencana KLB (Kejadian Luar Biasa)	Perubahan iklim yang tidak terdeteksi	Potensi penularan penyakit tertentu semakin meluas	Potensi kesiapsiagaan penanggulangan KLB masih rendah	Pemanfaatan aplikasi pemantauan potensi KLB
	Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular	Tingginya prevalensi penderita penyakit tidak menular	Perubahan gaya hidup yang berisiko	Kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat masih terbatas	Pemantauan pada produk yang dikonsumsi perlu ditingkatkan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko penyakit tidak menular
Promosi perilaku hidup bersih dan sehat	Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap PHBS	Pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat	Pengaruh informasi yang tidak valid	Kebijakan yang mendukung PHBS telah banyak	Dukungan lintas sektor semakin tinggi	Peningkatan promosi PHBS kepada masyarakat
	Kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan masyarakat	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Perubahan iklim yang tidak terdeteksi	Terbatasnya kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan	Terbatasnya kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

Isu strategis merupakan faktor-faktor penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan karena memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan rencana jangka menengah rumah sakit. Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan eksternal, perubahan kebijakan nasional, serta dinamika internal organisasi yang menuntut penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pengembangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mengidentifikasi beberapa isu strategis utama yang akan menjadi fokus penanganan selama periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

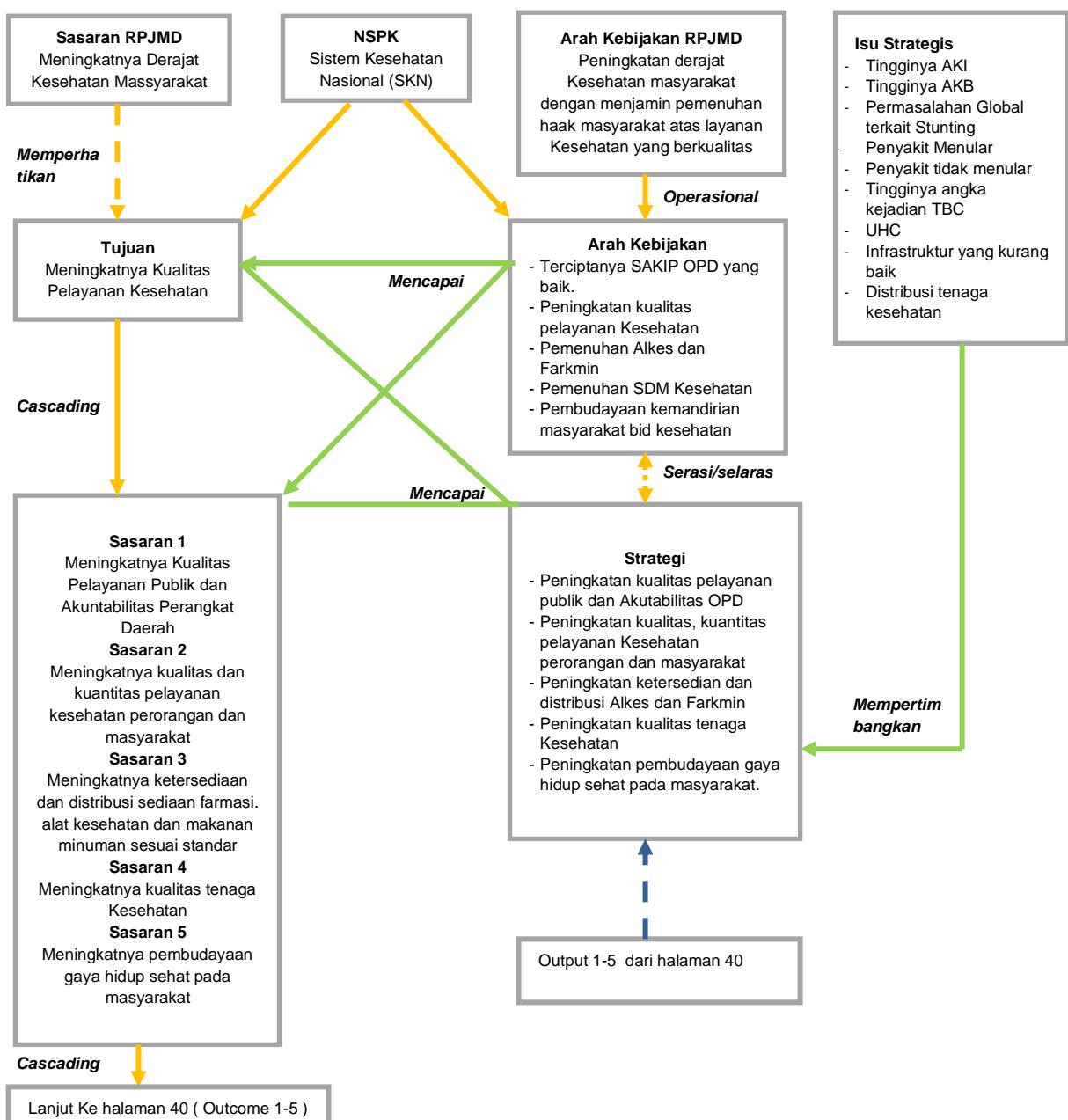
1. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masalah kesehatan
 - a. Infrakstruktur belum memadai
 - b. Rendahnya kualitas SDM
 - c. Masih adanya masyarakat miskin
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - a. Tingginya angka kesakitan penyakit menular
 - b. Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular
3. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat
 - a. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap PHBS
 - b. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan masyarakat

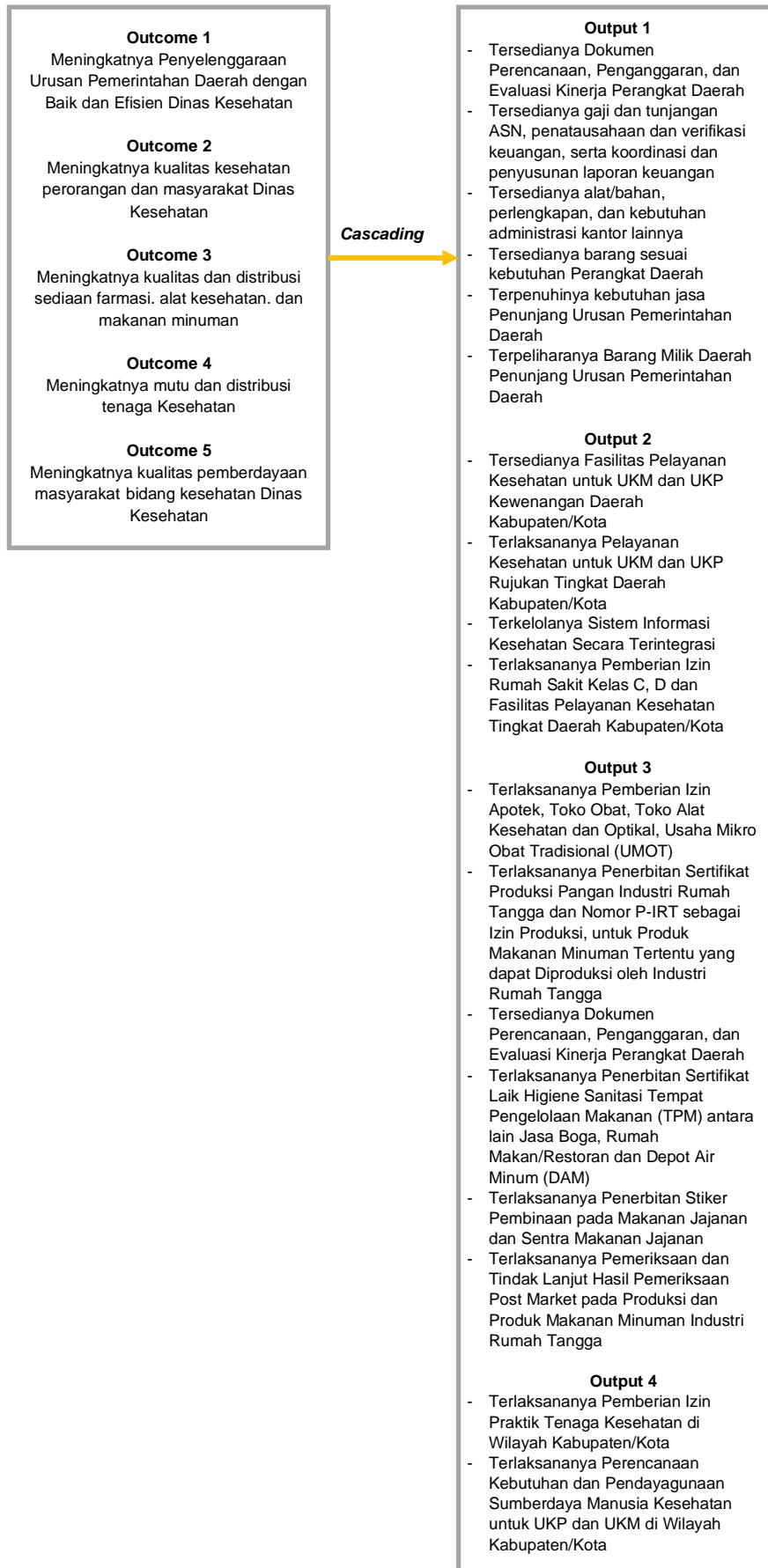
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

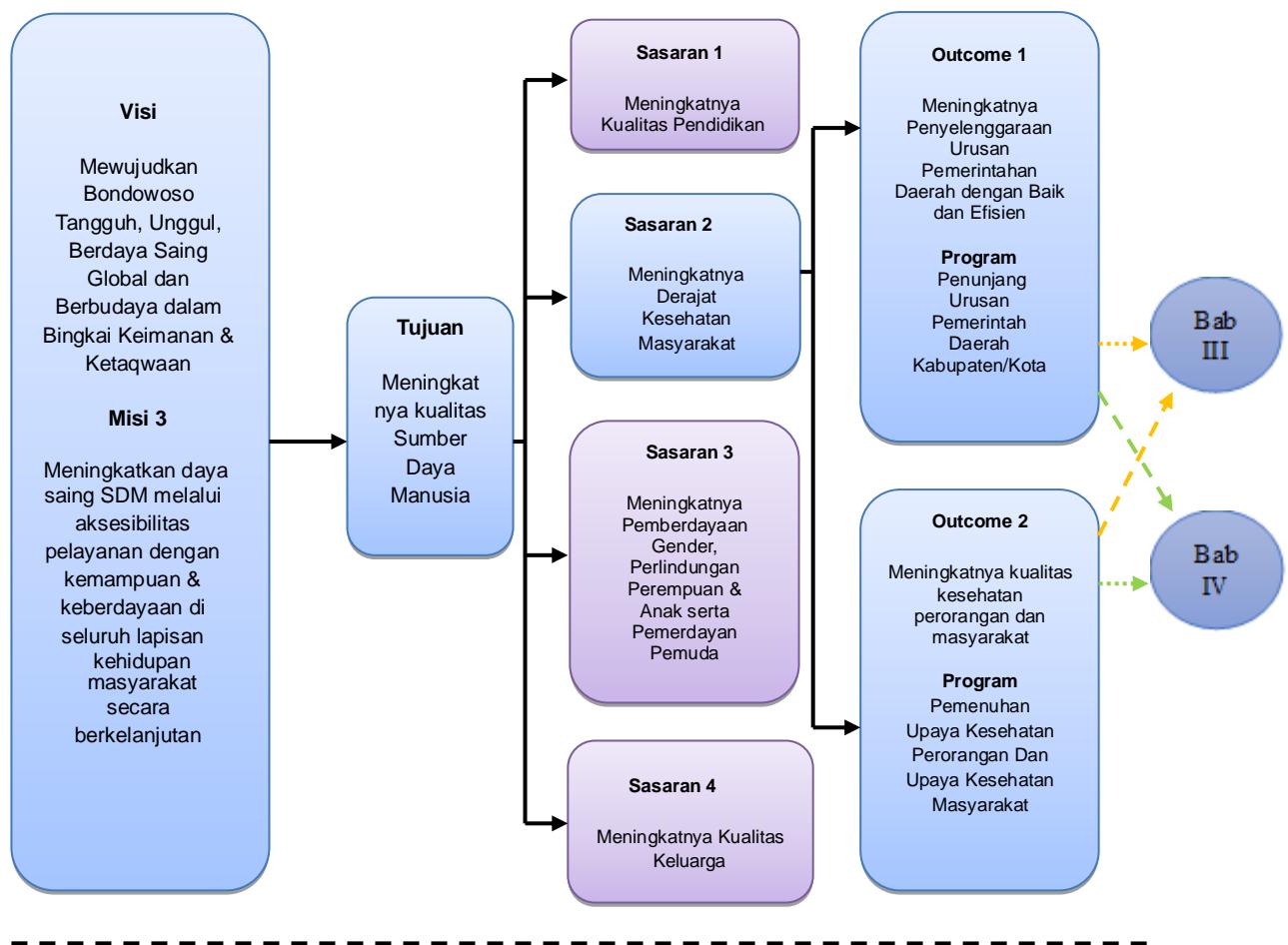
Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Kesehatan

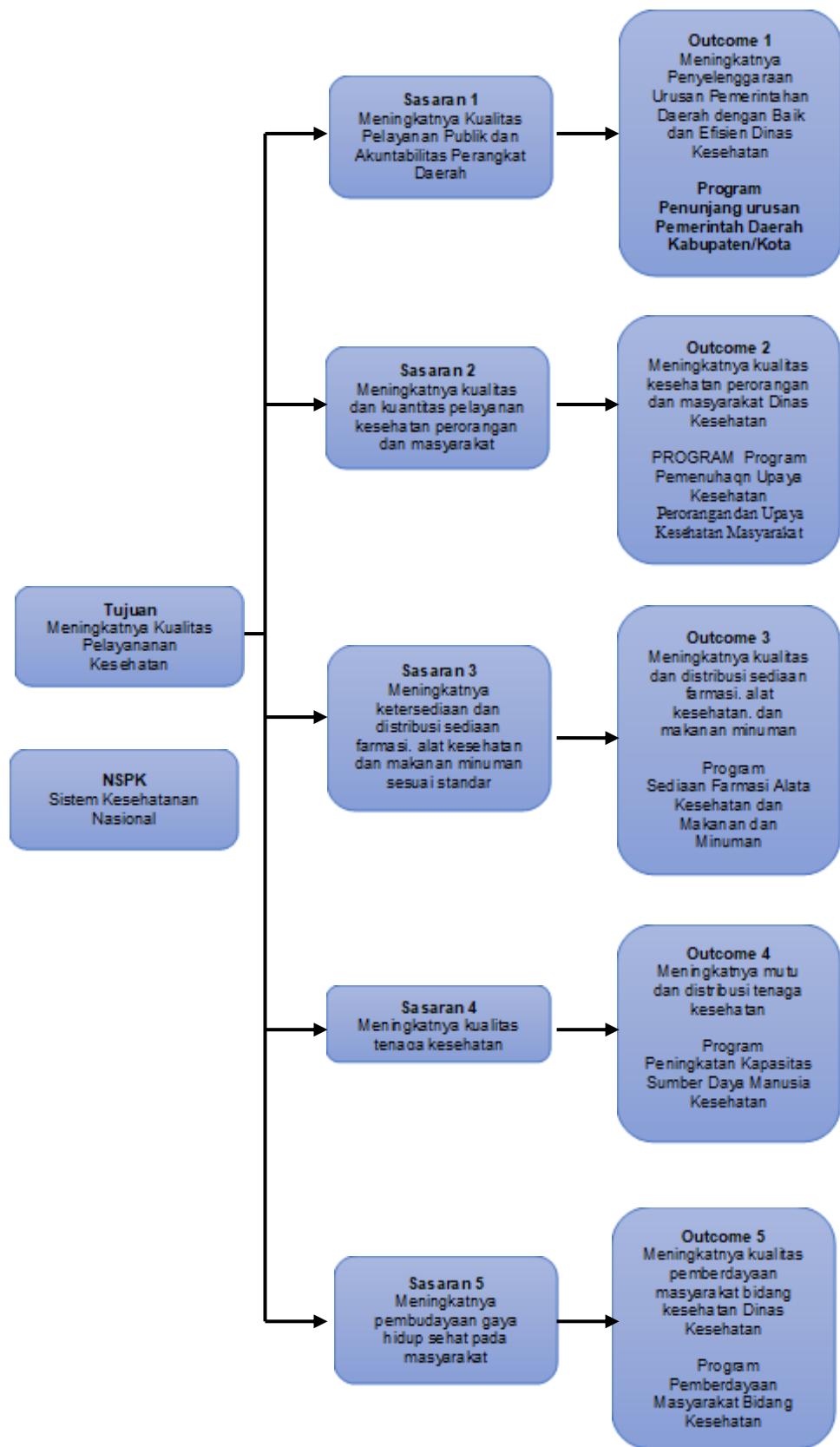




- Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Output 5**
- Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Terlaksananya kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kesehatan.





3.1. Tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029

Sebagai membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan. akan berperan dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Bondowoso "Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketaqwaan", khususnya pada Misi ke-3 yaitu "Meningkatnya daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan kemampuan dan keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan". Tujuan 3.1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia; serta Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Bondowoso tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merumuskan tujuan dalam Renstra 2025 – 2029 adalah

" Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan"

Tujuan ini mencerminkan Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menjalankan fungsi administrasi dinas, serta fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan lima sasaran utama dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yaitu: Tujuan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar.
4. Meningkatnya kualitas tenaga Kesehatan.
5. Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat Tabel berikut ini:

3.3. Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029

Strategi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan melalui Rencana Strategis (Renstra), yang menjabarkan upaya pembangunan kesehatan ke dalam program dan kegiatan, meliputi pengembangan kebijakan publik berwawasan sehat, penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan akses dan mutu pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

3.4. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian integral dari proses Perencanaan strategis yang bersifat komprehensif dan sistematis. Strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai secara efektif dan efisien, sedangkan arah kebijakan merinci langkah-langkah operasional sebagai penjabaran dari strategi tersebut. Kelimanya disusun untuk menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan tindakan nyata dilapangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029, telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan mutu layanan kesehatan, dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tersebut disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

Visi	Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketaqwaan		
Misi	Meningkatkan daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
	Meningkatnya kualitas dan	Peningkatan kualitas dan	Peningkatan pelayanan

	kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	Kesehatan masyarakat, peningkatan status gizi keluarga, kualitas kesehatan lingkungan, penyelenggaraan upaya pencegahan, pemeberantasan penyakit dan Pembangunan Rumah Sakit Perbatasan.
	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Peningkatan ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Pemenuhan dan pemerataan ketersediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standar.
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Peningkatan pemenuhan, kualitas dan pemerataan sumber daya Kesehatan.
	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Peningkatan pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat	Peningkatan pembudayaan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

Berikut merupakan teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah bisa dilihat tabel sebagai berikut:

BAB IV

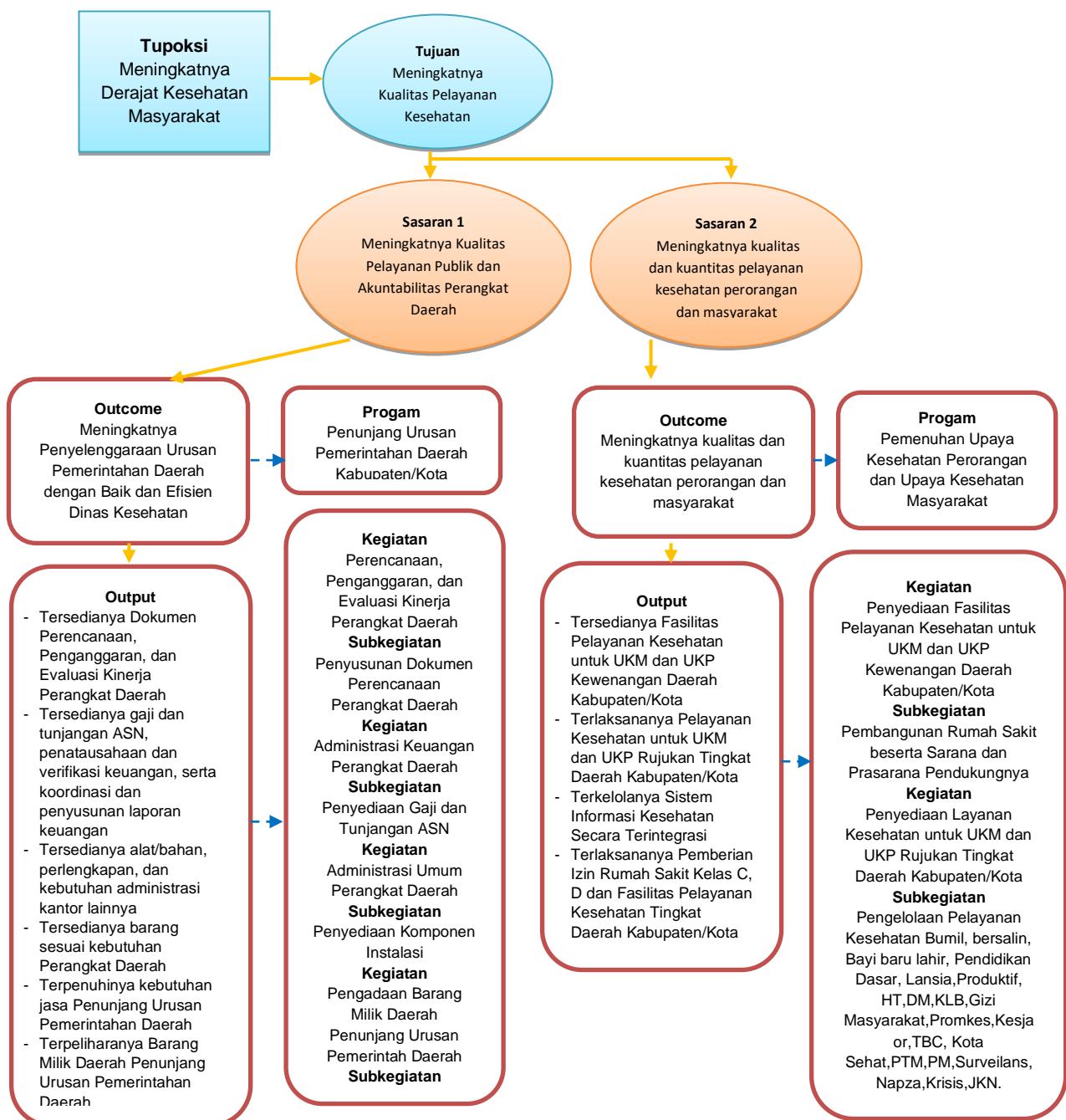
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

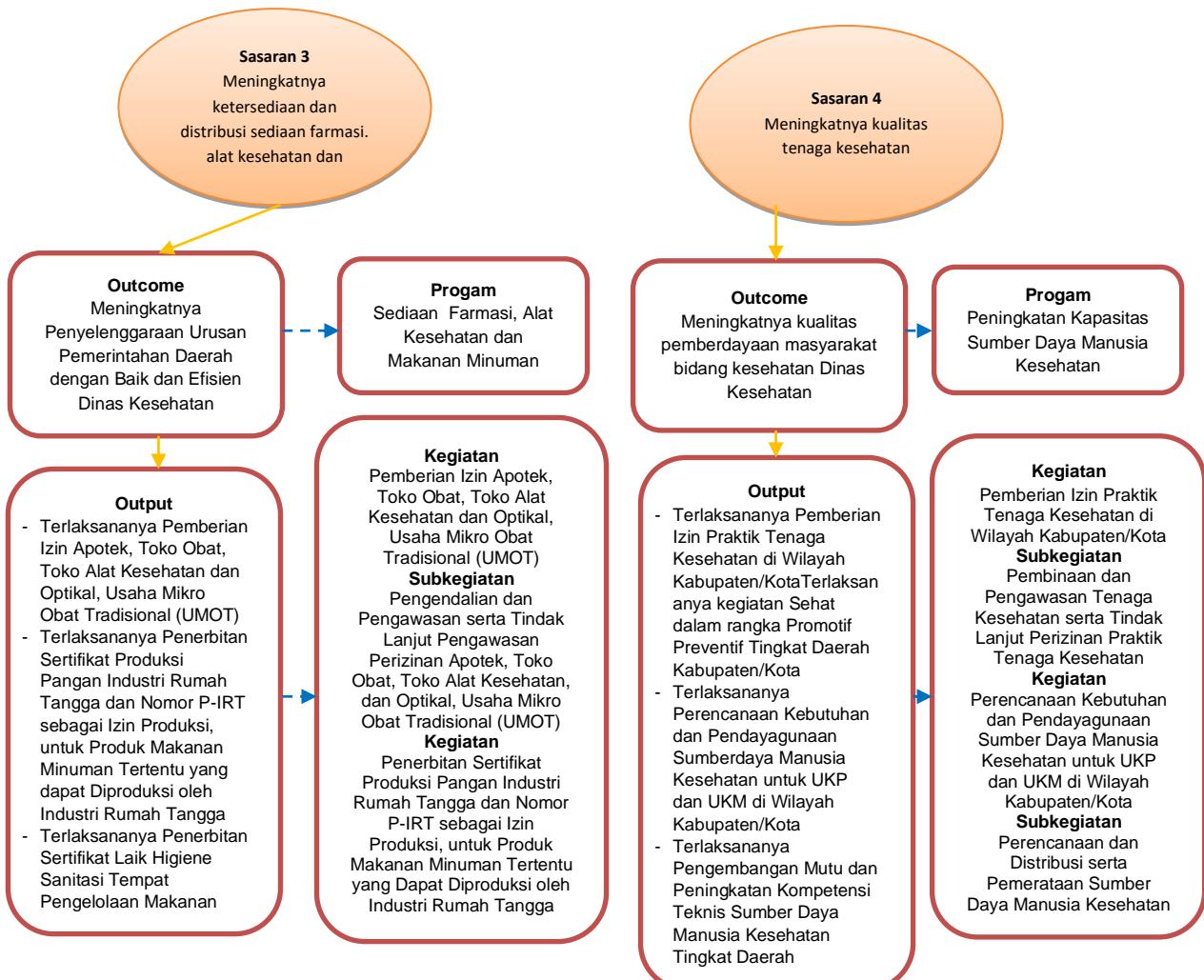
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan beberapa program. Program kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan guna merealisasikan target yang telah ditetapkan.

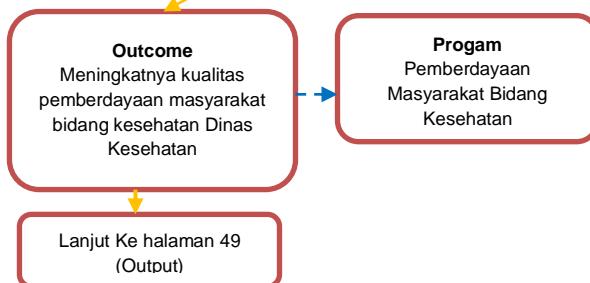
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

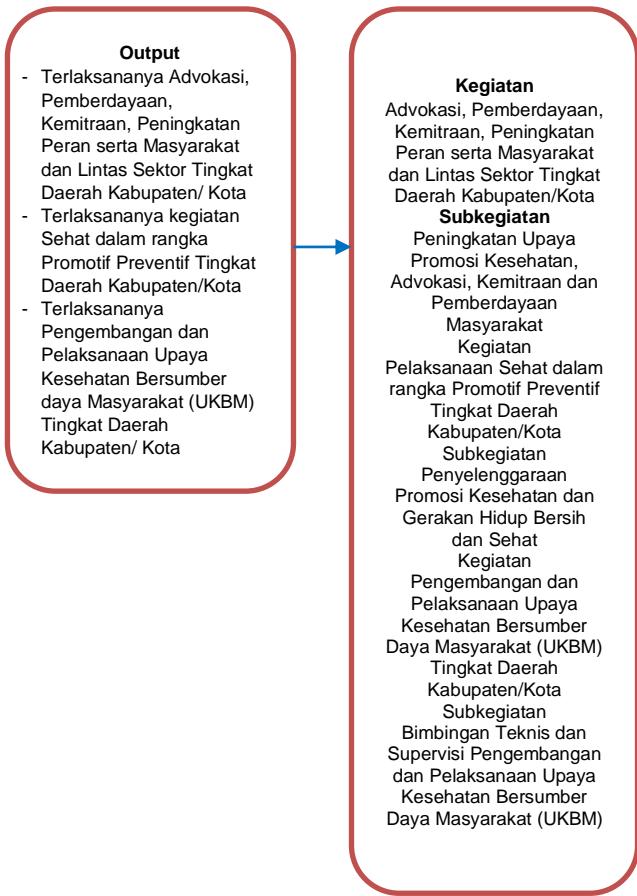






Sasaran 5
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat





Berikut merupakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun 2025 - 2029:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

- Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi
 - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan beberapa program. Program kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan

guna merealisasikan target yang telah ditetapkan. Berikut program perangkat daerah bisa di lihat di Tabel 4.1

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					202.382.547.242		211.315.859.012		211.631.156.952		216.296.095.014		226.091.023.375		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.860.675.714		71.833.183.814		69.955.189.714		70.155.189.714		73.285.180.014		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah denga Baik dan Efisien Dinas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	100	100	100	67.860.675.714	100	71.833.183.814	100	69.955.189.714	100	70.155.189.714	100	73.285.180.014	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	100	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Iyak fungsi (%)	100	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN					130.448.807.678		133.559.611.348		135.052.903.388		136.067.841.450		142.732.779.511		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	76,55	80	80,5	130.448.807.678	90	133.559.611.348	90	135.052.903.388	90	136.067.841.450	90	142.732.779.511	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	97,52	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	74,46	75	75		80		80		85		90	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,58	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	75,35	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	0,2	20	22		25		28		30		35	35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan	0	70	71		72		73		74		75	75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perlakuan	0	83	86		89		92		95		95	95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	70	73		76		78		81		83	83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,08	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	62,56	100	100		100		100		100		100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	10	11	12		13		14		15		16	16	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	100	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	70	71		72	73	74	74	75	75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	82,38	100	100		100	100	100	100	100	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	75	75	77		79	81	83	83	85	85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	8	10	11		12	13	14	14	15	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	24,71	25	25		25	25	25	25	25	25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	0	77	78		79	80	81	81	83	83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA					3.169.931.000	4.669.931.000	5.169.931.000	8.169.931.000	8.169.931.000	8.169.931.000		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	80	92	92	3.169.931.000	92	4.669.931.000	96	5.169.931.000	96	8.169.931.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000)	2,9	3	3		3,1		3,1		3,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
						80		81		83		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					466.030.850	716.030.850	716.030.850	966.030.850	966.030.850	966.030.850		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan	0	100	100	466.030.850	100	716.030.850	100	716.030.850	100	966.030.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	0	75	76		77		78		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)	0	10	20		30		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh	0	83,5	84		84,5		85		85,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	24	26		28		30		32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

1.02.05 - PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT					437.102.000		537.102.000		737.102.000		937.102.000		937.102.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	36	37	437.102.000	38	537.102.000	39	737.102.000	40	937.102.000	41	937.102.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
TOTAL KESELURUHAN					202.382.547.242	-	211.315.859.012	-	211.631.156.952	-	216.296.095.014	-	226.091.023.375	

4.2. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam Renstra merupakan penjabaran program – program kerja yang lebih detail dan operasional yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi dalam periode tertentu, biasanya lima tahun. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah nyata yang akan diambil untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, meliputi tujuan, target, waktu pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, penanggung jawab, serta identifikasi risiko dan strategi untuk mengatasinya. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat di Tabel 4.2.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.02.0.00.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- 3.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Dinas Kesehatan		Nilai SAKIP (Angka)		
					Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Tersedianya barang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat			Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
			Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	

	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
		Terlaksananya Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinhannya (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinhannya (Unit)	1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)		

Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Percentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		Percentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		Percentase penerbitan dan pemenuaan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		Percentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		Percentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		

	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

			Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)			
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan			Percentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	Percentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Percentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	Percentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat			Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

			Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	
		Terlaksananya kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Uraian subkegiatan dalam Renstra adalah bagian yang merinci langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup penjelasan detail tugas dari subkegiatan, indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, target kinerja kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai, serta pagu indikatif atau perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan subkegiatan tersebut selama periode Renstra Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir dapat dilihat di Tabel 4.3 IKD

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,35	98,5	98,76	98,88	98,92	99	99	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCY									
1	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	70	73	76	78	81	83	
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	0	83	86	89	92	95	95	
6	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	0,2	20	22	25	28	30	35	
7	Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,58	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	97,52	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	75,35	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	77,08	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	62,56	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah	%	0	83,5	84	84,5	85	85,5	86	
14	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Percentase	35	36	37	38	39	40	41	
15	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	0	75	76	77	78	78	80	
16	Cakupan penemuan kasus TB	%	74,46	75	75	80	80	85	90	
17	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	10	11	12	13	14	15	16	
18	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar	%	0	10	20	30	40	50	60	

19	Percentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	0	70	71	72	73	74	75	
20	Percentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	0	70	71	72	73	74	75	
21	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	0	77	78	79	80	81	83	
22	Percentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Percentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	80	92	92	92	96	96	96	
24	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	2,9	3	3	3,1	3,1	3,2	3,2	
25	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	76,55	80	80,5	90	90	90	90	
26	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	24,71	25	25	25	25	25	25	
27	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	8	10	11	12	13	14	15	
28	Percentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	0	24	26	28	30	32	34	
29	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	Percentase Laporan Keuangan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	
31	Percentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
32	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	75	75	77	79	81	83	85	
33	Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Percentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	82,38	100	100	100	100	100	100	
36	Percentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.4 V2

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.894.000	1	12.894.000	1	12.894.000	1	12.894.000	1	12.894.000	
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.794.000		8.794.000		8.794.000		8.794.000		8.794.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	8.794.000	1	8.794.000	1	8.794.000	1	8.794.000	1	8.794.000	
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				14.967.200		14.967.200		14.967.200		14.967.200		14.967.200	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	14.967.200	1	14.967.200	1	14.967.200	1	14.967.200	1	14.967.200	
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.881.200		5.881.200		5.881.200		5.881.200		5.881.200	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	5.881.200	2	5.881.200	2	5.881.200	2	5.881.200	2	5.881.200	
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja				25.949.100		25.949.100		25.949.100		25.949.100		25.949.100	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	25.949.100	2	25.949.100	2	25.949.100	2	25.949.100	2	25.949.100	
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.514.500		75.514.500		75.514.500		75.514.500		75.514.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	75.514.500	1	75.514.500	1	75.514.500	1	75.514.500	1	75.514.500	
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				2.350.000		2.350.000		2.350.000		2.350.000		2.350.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Banyak Acara Pada Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	1	2.350.000	
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				65.392.540.700		69.065.048.800		67.187.054.700		67.187.054.700		70.317.045.000	
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	65.392.540.700	2	69.065.048.800	2	67.187.054.700	2	67.187.054.700	2	70.317.045.000	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	850	1.184		1.184		1.184		1.184		1.184		
	Jumlah Laporan Kedudukan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Kedudukan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				65.373.127.700		69.045.635.800		67.167.641.700		67.167.641.700		70.297.632.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	850	1.184	65.373.127.700	1.184	69.045.635.800	1.184	67.167.641.700	1.184	67.167.641.700	1.184	70.297.632.000	
1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.945.000		1.945.000		1.945.000		1.945.000		1.945.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3	3	1.945.000	3	1.945.000	3	1.945.000	3	1.945.000	3	1.945.000	
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.182.000		3.182.000		3.182.000		3.182.000		3.182.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.182.000	1	3.182.000	1	3.182.000	1	3.182.000	1	3.182.000	
1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.100.000	
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				4.513.000		4.513.000		4.513.000		4.513.000		4.513.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12	4.513.000	12	4.513.000	12	4.513.000	12	4.513.000	12	4.513.000	
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.673.000		2.673.000		2.673.000		2.673.000		2.673.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	2.673.000	2	2.673.000	2	2.673.000	2	2.673.000	2	2.673.000	
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		

1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya barang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				1.856.226.314		2.156.226.314		2.156.226.314		2.356.226.314		2.356.226.314		
Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.856.226.314	12	2.156.226.314	12	2.156.226.314	12	2.356.226.314	12	2.356.226.314		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air				403.555.251		403.555.251		403.555.251		403.555.251		403.555.251		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	403.555.251	12	403.555.251	12	403.555.251	12	403.555.251	12	403.555.251		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.452.671.063		1.752.671.063		1.752.671.063		1.952.671.063		1.952.671.063		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.452.671.063	12	1.752.671.063	12	1.752.671.063	12	1.952.671.063	12	1.952.671.063		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.296.700		138.296.700		138.296.700		138.296.700		138.296.700		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	138.296.700	1	138.296.700	1	138.296.700	1	138.296.700	1	138.296.700		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				138.296.700		138.296.700		138.296.700		138.296.700		138.296.700		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	138.296.700	1	138.296.700	1	138.296.700	1	138.296.700	1	138.296.700		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	130.448.807.678	100	133.559.611.348	100	135.052.903.388	100	136.067.841.450	100	142.732.779.511	1.02.00.00.00.01.0	
	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	76,55	80,5		90		90		90		90			

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	97,52	100
Cakupan penemuan kasus TB (%)	74,46	75
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	95,58	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	75,35	100
Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masarakat (%)	0,2	22
Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	0	71
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	86
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	73
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,08	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan	62,56	100
Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	10	12
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100
Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	71
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	82,38	100
Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	75	77
Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	8	11
Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	24,71	25
Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	0	78

100			100		100		100		100		
80			80		85		90				
100			100		100		100		100		
100			100		100		100		100		
25			28		30		35				
72			73		74		75				
89			92		95		95				
76			78		81		83				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
13			14		15		16				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
100			100		100		100				
72			73		74		75				
100			100		100		100				
79			81		83		85				
12			13		14		15				
25			25		25		25				
79			80		81		83				
49.500.374.107			54.611.177.777		56.104.469.817		57.119.407.879		63.784.345.940		
4.920			4.920		4.920		4.920		4.920		
100			100		100		100				

1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	4.920	4.920
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terelihara Sesuai Standar	158	100

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10	6		8		8		8		10		
Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8	10		12		14		16		17		
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	1		1		1		1		1		
Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	5		5		5		5		5		
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	29	29		29		29		29		29		
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			2.819.355.550		3.819.355.550		4.319.355.550		4.619.355.550		4.669.355.550	
Terperluhnya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	1	2.819.355.550	1	3.819.355.550	1	4.319.355.550	1	4.619.355.550	1	4.669.355.550	
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas			11.279.544.200		11.779.544.200		12.779.544.200		13.279.544.200		13.279.544.200	
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5	5	11.279.544.200	5	11.779.544.200	5	12.779.544.200	5	13.279.544.200	5	13.279.544.200	
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			7.230.799.700		8.230.799.700		8.730.799.700		9.230.799.700		9.613.100.587	
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	8	10	7.230.799.700	12	8.230.799.700	14	8.730.799.700	16	9.230.799.700	17	9.613.100.587	
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			15.008.141.607		15.545.050.000		16.545.050.000		17.545.050.000		21.645.050.000	
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	10	6	15.008.141.607	8	15.545.050.000	8	16.545.050.000	8	17.545.050.000	10	21.645.050.000	
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			269.369.000		269.369.000		269.369.000		269.369.000		269.369.000	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance	29	29	269.369.000	29	269.369.000	29	269.369.000	29	269.369.000	29	269.369.000	
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Sesuai Standar	158	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	

1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas				12.468.240.050		14.542.135.327		13.035.427.367		11.750.365.429		13.883.002.603	
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	12.468.240.050	2	14.542.135.327	2	13.035.427.367	2	11.750.365.429	2	13.883.002.603	
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				270.600.000		270.600.000		270.600.000		270.600.000		270.600.000	
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	4.920	4.920	270.600.000	4.920	270.600.000	4.920	270.600.000	4.920	270.600.000	4.920	270.600.000	
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				94.324.000		94.324.000		94.324.000		94.324.000		94.324.000	
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1	1	94.324.000	1	94.324.000	1	94.324.000	1	94.324.000	1	94.324.000	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Ruiukan Tingkat Daerah				79.473.125.871		77.473.125.871		77.473.125.871		77.473.125.871		77.473.125.871	
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Ruiukan Tingkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	9		79.473.125.871	9	77.473.125.871	9	77.473.125.871	9	77.473.125.871	9	77.473.125.871	
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	12.155	9.572		9.615		9.656		9.695		9.733		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	1.655	1.520		1.527		1.534		1.540		1.546		
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	13.569	8.741		7.501		6.615		5.941		5.420		
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	16.154	13.900		13.900		13.900		13.900		13.900		
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	13.569	8.741		7.501		6.615		5.941		5.420		
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.258	10.258		10.258		10.258		10.258		10.258		
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.428	9.620		9.789		9.832		9.999		10.038		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	1		1		1		1		1		
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	86.767	86.767		86.767		86.767		86.767		86.767		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11	11		11		11		11		11		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24	24		24		24		24		24		

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	12		12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	4		4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22	22		22	22	22	22	22	22	22	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12		12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	8	8		8	8	8	8	8	8	8	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	12	12		12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.201	46.640		46.855	47.059	47.252	47.252	47.252	47.434	47.434	
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.706	9.518		9.562	9.724	9.763	9.763	9.763	9.922	9.922	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	12		12	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Specimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1		1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	250		250	250	250	250	250	250	250	
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500.201	498.340		497.340	495.790	494.320	494.320	494.320	492.890	492.890	
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123.217	138.012		138.012	138.012	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.154	56.796		57.050	57.293	57.526	57.526	57.526	57.748	57.748	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	7	5		5	5	5	5	5	5	5	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12		12	12	12	12	12	12	12	
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			136.205.000		136.205.000		136.205.000		136.205.000		136.205.000
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.258	10.258	136.205.000	10.258	136.205.000	10.258	136.205.000	10.258	136.205.000	136.205.000
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			96.379.000		96.379.000		96.379.000		96.379.000		96.379.000
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.428	9.620	96.379.000	9.789	96.379.000	9.832	96.379.000	9.999	96.379.000	10.038
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru			421.901.950		421.901.950		421.901.950		421.901.950		421.901.950
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.706	9.518	421.901.950	9.562	421.901.950	9.724	421.901.950	9.763	421.901.950	9.922
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			102.510.000		102.510.000		102.510.000		102.510.000		102.510.000

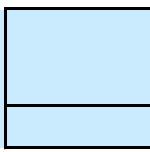
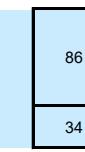
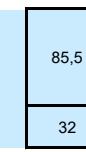
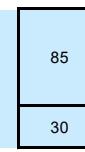
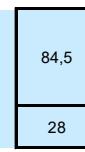
Terkelola Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44.201	46.640	102.510.000	46.855	102.510.000	47.059	102.510.000	47.252	102.510.000	47.434	102.510.000	
1.02.02.2.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				69.665.000		69.665.000		69.665.000		69.665.000		69.665.000	
Terkelola Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	86.767	86.767	69.665.000	86.767	69.665.000	86.767	69.665.000	86.767	69.665.000	86.767	69.665.000	
1.02.02.2.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				42.045.000		42.045.000		42.045.000		42.045.000		42.045.000	
Terlaksanya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500.201	498.340	42.045.000	497.340	42.045.000	495.790	42.045.000	494.320	42.045.000	492.890	42.045.000	
1.02.02.2.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				18.340.000		18.340.000		18.340.000		18.340.000		18.340.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123.217	138.012	18.340.000	138.012	18.340.000	138.012	18.340.000	139.000	18.340.000	139.000	18.340.000	
1.02.02.2.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				6.540.000		6.540.000		6.540.000		6.540.000		6.540.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.154	56.796	6.540.000	57.050	6.540.000	57.293	6.540.000	57.526	6.540.000	57.748	6.540.000	
1.02.02.2.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				571.926.560		571.926.560		571.926.560		571.926.560		571.926.560	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.155	9.572	571.926.560	9.615	571.926.560	9.656	571.926.560	9.695	571.926.560	9.733	571.926.560	
1.02.02.2.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				158.967.000		158.967.000		158.967.000		158.967.000		158.967.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.655	1.520	158.967.000	1.527	158.967.000	1.534	158.967.000	1.540	158.967.000	1.546	158.967.000	
1.02.02.2.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.451.244.000		1.451.244.000		1.451.244.000		1.451.244.000		1.451.244.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	13.569	8.741	2.451.244.000	7.501	1.451.244.000	6.615	1.451.244.000	5.941	1.451.244.000	5.420	1.451.244.000	
1.02.02.2.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				795.059.000		795.059.000		795.059.000		795.059.000		795.059.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	16.154	13.900	795.059.000	13.900	795.059.000	13.900	795.059.000	13.900	795.059.000	13.900	795.059.000	
1.02.02.2.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	12	20.770.000	12	20.770.000	12	20.770.000	12	20.770.000	12	20.770.000	
1.02.02.2.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi				2.104.890.000		2.104.890.000		2.104.890.000		2.104.890.000		2.104.890.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	4	2.104.890.000	4	2.104.890.000	4	2.104.890.000	4	2.104.890.000	4	2.104.890.000	
1.02.02.2.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	
Terlaksanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22	22	11.400.000	22	11.400.000	22	11.400.000	22	11.400.000	22	11.400.000	

1.02.02.2.00.017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.686.501.500		1.686.501.500		1.686.501.500		1.686.501.500		1.686.501.500		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12	1.686.501.500	12	1.686.501.500	12	1.686.501.500	12	1.686.501.500	12	1.686.501.500		
1.02.02.2.00.018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				298.808.200		298.808.200		298.808.200		298.808.200		298.808.200		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	7	5	298.808.200	5	298.808.200	5	298.808.200	5	298.808.200	5	298.808.200		
1.02.02.2.00.019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	8	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000	8	70.000.000		
1.02.02.2.00.020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				144.870.000		144.870.000		144.870.000		144.870.000		144.870.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	144.870.000	12	144.870.000	12	144.870.000	12	144.870.000	12	144.870.000		
1.02.02.2.00.022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan				38.854.800		38.854.800		38.854.800		38.854.800		38.854.800		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	250	38.854.800	250	38.854.800	250	38.854.800	250	38.854.800	250	38.854.800		
1.02.02.2.00.024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis				31.347.500		31.347.500		31.347.500		31.347.500		31.347.500		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	12	12	31.347.500	12	31.347.500	12	31.347.500	12	31.347.500	12	31.347.500		
1.02.02.2.00.025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3.593.405.050		2.593.405.050		2.593.405.050		2.593.405.050		2.593.405.050		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11	11	3.593.405.050	11	2.593.405.050	11	2.593.405.050	11	2.593.405.050	11	2.593.405.050		
1.02.02.2.00.026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				61.609.220.349		61.609.220.349		61.609.220.349		61.609.220.349		61.609.220.349		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24	24	61.609.220.349	24	61.609.220.349	24	61.609.220.349	24	61.609.220.349	24	61.609.220.349		
1.02.02.2.00.028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium				14.180.000		14.180.000		14.180.000		14.180.000		14.180.000		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1	1	14.180.000	1	14.180.000	1	14.180.000	1	14.180.000	1	14.180.000		
1.02.02.2.00.029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota				177.625.000		177.625.000		177.625.000		177.625.000		177.625.000		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	1	177.625.000	1	177.625.000	1	177.625.000	1	177.625.000	1	177.625.000		
1.02.02.2.00.033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				611.779.000		611.779.000		611.779.000		611.779.000		611.779.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	611.779.000	1	611.779.000	1	611.779.000	1	611.779.000	1	611.779.000		
1.02.02.2.00.034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan				3.767.555.000		3.767.555.000		3.767.555.000		3.767.555.000		3.767.555.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	3.767.555.000	1	3.767.555.000	1	3.767.555.000	1	3.767.555.000	1	3.767.555.000		
1.02.02.2.00.037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon				6.965.000		6.965.000		6.965.000		6.965.000		6.965.000		

Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	12	6.965.000	12	6.965.000	12	6.965.000	12	6.965.000	12	6.965.000	
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				207.085.981		207.085.981		207.085.981		207.085.981		207.085.981	
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelajaran	13.569	8.741	207.085.981	7.501	207.085.981	6.615	207.085.981	5.941	207.085.981	5.420	207.085.981	
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				207.085.981		207.085.981		207.085.981		207.085.981		207.085.981	
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)		9	207.085.981	9	207.085.981	9	207.085.981	9	207.085.981	9	207.085.981	
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.175.307.700		1.175.307.700		1.175.307.700		1.175.307.700		1.175.307.700	
Terlaksananya Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti	7	7	1.175.307.700	7	1.175.307.700	7	1.175.307.700	7	1.175.307.700	7	1.175.307.700	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25	25		25		25		25		25		
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				28.796.000		28.796.000		28.796.000		28.796.000		28.796.000	
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti	7	7	28.796.000	7	28.796.000	7	28.796.000	7	28.796.000	7	28.796.000	
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.146.511.700		1.146.511.700		1.146.511.700		1.146.511.700		1.146.511.700	
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25	25	1.146.511.700	25	1.146.511.700	25	1.146.511.700	25	1.146.511.700	25	1.146.511.700	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				3.169.931.000		4.669.931.000		5.169.931.000		8.169.931.000		8.169.931.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	80	92	3.169.931.000	92	4.669.931.000	96	5.169.931.000	96	8.169.931.000	96	8.169.931.000	1.02.00.00.00.01.000 - Dinas
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,9	3		3,1		3,1		3,2		3,2		
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai	100	100		100		100		100		100		
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				8.943.000		8.943.000		8.943.000		30.993.000		30.993.000	
Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	11	16	8.943.000	16	8.943.000	16	8.943.000	16	30.993.000	16	30.993.000	

1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				8.943.000		8.943.000		8.943.000		30.993.000		30.993.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	11	16	8.943.000	16	8.943.000	16	8.943.000	16	30.993.000	16	30.993.000	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah				1.761.118.000		1.761.118.000		1.761.118.000		3.311.118.000		3.311.118.000	
Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvakes) (Orang)	201	350	1.761.118.000	350	1.761.118.000	350	1.761.118.000	350	3.311.118.000	350	3.311.118.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	39	58		58		58		58		58		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	29		29		29		29		29		
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				28.848.000		28.848.000		28.848.000		78.848.000		78.848.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	29	28.848.000	29	28.848.000	29	28.848.000	29	78.848.000	29	78.848.000	
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				1.488.417.000		1.488.417.000		1.488.417.000		2.488.417.000		2.488.417.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvakes) (Orang)	201	350	1.488.417.000	350	1.488.417.000	350	1.488.417.000	350	2.488.417.000	350	2.488.417.000	
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				243.853.000		243.853.000		243.853.000		743.853.000		743.853.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	39	58	243.853.000	58	243.853.000	58	243.853.000	58	743.853.000	58	743.853.000	
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota				1.399.870.000		2.899.870.000		3.399.870.000		4.827.820.000		4.827.820.000	
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota yang Ditinjuktakan Mutu dan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota yang Ditinjuktakan Mutu dan	201	350	1.399.870.000	350	2.899.870.000	350	3.399.870.000	350	4.827.820.000	350	4.827.820.000	
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota				1.399.870.000		2.899.870.000		3.399.870.000		4.827.820.000		4.827.820.000	
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota yang Ditinjuktakan Mutu dan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota yang Ditinjuktakan Mutu dan	201	350	1.399.870.000	350	2.899.870.000	350	3.399.870.000	350	4.827.820.000	350	4.827.820.000	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				466.030.850		716.030.850		716.030.850		966.030.850		966.030.850	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)	0	20	466.030.850	30	716.030.850	40	716.030.850	50	966.030.850	60	966.030.850	1.02.00.00.00.01.0
	Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan	0	76		77		78		78		80		

Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (%)	0	84
Persentase sarana RTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	26



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			104.039.600		134.039.600		134.039.600		214.039.600		214.039.600				
Terlaksanya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	70	104.039.600	70	134.039.600	70	134.039.600	70	214.039.600	70	214.039.600				
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			104.039.600		134.039.600		134.039.600		214.039.600		214.039.600				
Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60	70	104.039.600	70	134.039.600	70	134.039.600	70	214.039.600	70	214.039.600				
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri				107.597.000		137.597.000		137.597.000		155.900.725		155.900.725				
Terlaksanya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50	50	107.597.000	50	137.597.000	70	137.597.000	70	155.900.725	80	155.900.725				
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				107.597.000		137.597.000		137.597.000		155.900.725		155.900.725				
Terlaksanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50	50	107.597.000	50	137.597.000	70	137.597.000	70	155.900.725	80	155.900.725				
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Dennet Air				83.444.250		114.000.000		114.000.000		175.900.725		175.900.725				

Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	1	1	83.444.250	1	114.000.000	1	114.000.000	1	175.900.725	1	175.900.725	
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,			83.444.250		114.000.000		114.000.000		175.900.725		175.900.725	
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	1	1	83.444.250	1	114.000.000	1	114.000.000	1	175.900.725	1	175.900.725	
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			75.950.000		110.204.450		110.204.450		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	75.950.000	1	110.204.450	1	110.204.450	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			75.950.000		110.204.450		110.204.450		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	75.950.000	1	110.204.450	1	110.204.450	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			95.000.000		220.189.800		220.189.800		320.189.800		320.189.800	
Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60	60	95.000.000	60	220.189.800	60	220.189.800	60	320.189.800	60	320.189.800	
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			95.000.000		220.189.800		220.189.800		320.189.800		320.189.800	
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60	60	95.000.000	60	220.189.800	60	220.189.800	60	320.189.800	60	320.189.800	
1.02.05 - PROGRAM PEMERIKSAAN MASYARAKAT				562.904.000		669.194.100		875.798.699		1.082.733.531		1.090.015.106	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	35	37	437.102.000	38	537.102.000	39	737.102.000	40	937.102.000	41	937.102.000	1.02.00.00.00.01.000 - Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah				215.218.500		315.218.500		365.218.500		465.218.500		465.218.500	

Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam <i>kualitas air minum dan sanitasi</i>	1	1	215.218.500	1	315.218.500	1	365.218.500	1	465.218.500	1	465.218.500	
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	8	4		4		4		4		4		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				115.218.500		215.218.500		265.218.500		365.218.500		365.218.500	
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	8	4	115.218.500	4	215.218.500	4	265.218.500	4	365.218.500	4	365.218.500	
1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam <i>kualitas air minum dan sanitasi</i>	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				101.333.500		101.333.500		176.333.500		226.333.500		226.333.500	
Terlaksananya kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	2	3	101.333.500	3	101.333.500	3	176.333.500	3	226.333.500	3	226.333.500	
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup				101.333.500		101.333.500		176.333.500		226.333.500		226.333.500	
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	2	3	101.333.500	3	101.333.500	3	176.333.500	3	226.333.500	3	226.333.500	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah				120.550.000		120.550.000		195.550.000		245.550.000		245.550.000	
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1	1	120.550.000	1	120.550.000	1	195.550.000	1	245.550.000	1	245.550.000	
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				120.550.000		120.550.000		195.550.000		245.550.000		245.550.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1	1	120.550.000	1	120.550.000	1	195.550.000	1	245.550.000	1	245.550.000	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Uraian sub kegiatan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah penjabaran kegiatan lebih detail yang mendukung program prioritas, yang disusun dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra dapat dilihat di Tabel 4.4

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KFSFHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KFSFHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Target keberhasilan Renstra Dinas Kesehatan 2025–2029 dicapai melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan IKU yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). IKU ini mencerminkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan, seperti peningkatkan umur harapan hidup, penurunkan angka kematian bayi dan ibu, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang semuanya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel 4.5

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.02.00.00.01.0000 - Dinas Kesehatan									
1.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,35	98,5	98,76	98,88	98,92	99	99	
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	231,9	189,41 - 199,81	187,41 - 198,81	185,41 - 197,81	183,41 - 196,81	181,41 - 195,81	179,41 - 194,81	
3.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	33	35	37	39	40	41	43	
4.	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	0	65	66	67	68	69	70	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,5	83,75	83,9	84,05	84,2	84,35	84,5	
6.	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	74	75	76	77	78	79	80	
7.	Nilai SAKIP	Angka	82,57	82,96	83,35	83,74	84,13	84,52	84,91	
8.	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	15,28	15,25	14,75	14,5	14,25	14	13,75	
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	11,2	10	8	7	6	5	5	
10.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	80,6	80	82	83	84	85	85	
12.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	86,65	85	85	85	90	90	90	
13.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	96	96	96	96	100	100	100	

**4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025–2029 dirumuskan melalui Sasaran RPJMD yang dipecah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini menggambarkan pencapaian target dari urusan pemerintahan spesifik untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Penyusunan ini melibatkan analisis data pembangunan lima tahun terakhir dan diselaraskan dengan RPJMN serta Rancangan Teknokratik RPJMD untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terkoordinasi. Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat di Tabel 4.6.

Tabel Indikator Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Kunci	Target					Realisasi					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100	94,86	99,22	100	97,5	100%	95%	99%	100%	98%
2	Cakupan penemuan kasus TB	80	80	90	90	90	52,4	60,4	78,2	94,5	74,4	66%	76%	87%	105%	83%
3	Percentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	95,09	95,56	100	100	95,58	95%	96%	100%	100%	96%
4	Percentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
5	Percentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	91,93	95,88	96,22	94,53	75,35	92%	96%	96%	95%	75%
6	Percentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masvarakat	0	0	0	0	0,009	0	0	0	0	0,009	0%	0%	0%	0%	100%
7	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
8	Percentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	0	0	0	100	100	0	0	0	40	100	0%	0%	0%	40%	100%
9	Percentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	0	0	100	100	100	0	0	65,3	68,72	68,2	0%	0%	65%	69%	68%
10	Percentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
11	Percentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	99,12	100	100	99,36	77,08	99%	100%	100%	99%	77%
12	Percentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	85,86	87,69	84,86	82,06	62,56	86%	88%	85%	82%	63%
13	Percentase Laporan Keuangan yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Percentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100	100	100	100	100	44,81	44,69	46,96	47,45	47,8	45%	45%	47%	47%	48%

15	Percentase merokok penduduk 10-21 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
16	Percentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	97,64	100	100	100	98%	100%	100%	100%	100%	
17	Percentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	99,51	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Percentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	63,57	61,22	100	100	64%	61%	100%	100%	100%	
19	Percentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	63,57	61,22	100	100	64%	61%	100%	100%	100%	
20	Percentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	67	69	71	73	75	61	63	65	66	69	91%	91%	92%	90%	92%
21	Percentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	86,6	88,33	100	100	100	87%	88%	100%	100%	100%
22	Percentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	15,22	16,53	19,66	83,8	100	15%	17%	20%	84%	100%
23	Percentase penerbitan dan pemenuaan komitmen SPP - IRT sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
24	Percentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	80	80	82	82	85	80	80	82	85	85	100%	100%	100%	104%	100%
25	Percentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Percentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Percentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Percentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	

29	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0	0	100	100	100	0	0	72,19	76,45	76,55	0%	0%	72%	76%	77%
30	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	82	84	83	86	100	81,32	91,75	72,5	83,33	58	99%	109%	87%	97%	58%
31	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	11	12	13	14	15	21,01	22,09	23,19	24,29	25,39	191%	184%	178%	174%	169%
32	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	36,04	32,71	65,9	71,25	82,38	36%	33%	66%	71%	82%
33	Presentase lanjut usia yang mandiri	0	0	0	50	50	0	0	0	14,4	19,6	0%	0%	0%	29%	39%
34	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
35	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	0	0	0	0	23,4	0	0	0	0	85	0%	0%	0%	0%	363%
36	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	0	0	0	0	76,61	0	0	0	0	100	0%	0%	0%	0%	131%

BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rencana Strategis (Renstra) ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun, mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis.

Disadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat keterbatasan, baik dari aspek data, analisis, maupun prediksi kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan atau perubahan yang signifikan sebagai hasil evaluasi internal maupun eksternal, maka reviu terhadap Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) ini sangat bergantung pada komitmen, partisipasi aktif, dedikasi, dan kerja keras seluruh karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso baik dalam bentuk kebijakan, administrasi, teknis, maupun politis. Rencana strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal, untuk itu perlu masukan dan saran-saran untuk rencana perbaikan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dokumen ini menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong

peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso secara berkelanjutan.

Bondowoso, 19 September 2025

TIM PENYUSUN

LAMPIRAN

**DEFINISI OPERASIOANL DAN FORMULARIUM
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
DALAM RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029**

NO	Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Subkegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Subkegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formularium	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ((%))	Semua penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, yang terdaftar dan terakomodasi dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan, yang tujuannya memastikan setiap orang mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Persentase cakupan kepesertaan JKN = (Jumlah Peserta JKN/ Jumlah Penduduk) * 100%	Kepala Dinkes	-
	Sasaran 1						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dihitung berdasarkan hasil survei masyarakat pengguna layanan dengan instrumen baku sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017	Hasil Survey Kerjasama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	Kepala Dinkes	-
			Nilai SAKIP (Angka)	Skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan, sesuai pedoman PermenPANRB No. 88 Tahun 2021	Skor komposit berdasarkan bobot 30% perencanaan, 25% pengukuran, 15% pelaporan, 10% evaluasi internal, 20% capaian. Dilhitung oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso	Kepala Dinkes	IKU (Indikator Kinerja Utama)

2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstretik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.	Kepala Bidang Kesmas, P2, Yankes dan SDK	
			Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi) Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut : - ≥ 140 = sangat tinggi - $71 < \text{AKBa} < 140$ = tinggi - $20 < \text{AKBa} < 70$ = sedang - ≤ 20 = rendah	Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dan dikali 1000		

			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PAB(5)P stunting = (JAB(5)P stunting/JAB(5)) dikali 100%		
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target	Jumlah kabupaten/kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target, dibagi total kabupaten/kota, lalu dikalikan 100		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama dikali 100		
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun.	Jumlah semua kasus TBC diobati yang memiliki hasil akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap diantara Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dikali 100		

			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan kelola stress) 3) Pengelolaan farmakologis Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, dibagi jumlah total penderita hipertensi, dikali 100		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas terregistrasi yang paling lambat operasional di tahun 2026 Unit populasi: Puskesmas terregistrasi yang paling	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi puskesmas yang telah terregistrasi dikali 100		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	Persentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029.	Jumlah Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi RS Pemerintah (RS yang memiliki izin operasional maksimal tahun 2027) dikali 100		

3	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, distribusi, serta pengawasan terhadap produk farmasi, alat kesehatan, dan pangan yang memenuhi standar di suatu wilayah dalam		Kepala Bidang SDK	
4	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pertumbuhan atau peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas tenaga kesehatan dalam periode tertentu.	Persentase Peningkatan Kompetensi = Jumlah SDM yang mengalami peningkatan kompetensi dibagi total SDM yang dievaluasi dikali 100%	Kepala Bidang SDK	
5	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	Persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama	Jumlah penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama dalam suatu wilayah dibagi jumlah penduduk >10 tahun dikali 100	Kepala Bidang Kesmas	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi yang telah disusun oleh perangkat daerah dibandingkan dengan jumlah dokumen wajib disusun	Σ dokumen perencanaan dan evaluasi yang telah di susun ----- X100% Σ dokumen perencanaan dan evaluasi yang wajib disusun	Sekretaris Dinkes	-

			Persentase Laporan keuangan yang disusun	Persentase jumlah laporan keuangan yang telah disusun oleh perangkat daerah sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan yang wajib disusun setiap tahun anggaran.	$\frac{\Sigma \text{ laporan keuangan yang telah disusun}}{100\% \Sigma \text{ laporan keuangan yang wajib disusun}} \times 100\%$	Sekretaris Dinkes	-
			Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	Ketersediaan jenis sarana dan prasarana sesuai hasil perhitungan pada Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kemenkes RI.	$\frac{\Sigma \text{ sarana dan prasarana yang layak fungsi}}{\Sigma \text{ sarana dan prasarana yang tersedia}} \times 100\%$	Sekretaris Dinkes	-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Banyaknya dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	$\Sigma \text{ dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen perencanaan perangkat daerah	$\Sigma \text{ dokumen perencanaan perangkat daerah}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.2	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	$\Sigma \text{ koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	$\Sigma \text{ koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.4	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	$\Sigma \text{ koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.5	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	$\Sigma \text{ koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.6	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	$\Sigma \text{ koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD}$	Perencana Ahli Muda	-
1.1.7	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	Banyaknya evaluasi kinerja perangkat daerah	$\Sigma \text{ evaluasi kinerja perangkat daerah}$	Perencana Ahli Muda	-

1.1.8	Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah pelaksanaan pengumpulan data statistik sektorl daerah	Banyaknya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektorl daerah	Σ pelaksanaan pengumpulan data statistik sektorl daerah	Perencana Ahli Muda	-
1.1.9	Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Σ pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencana Ahli Muda	-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Banyaknya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Σ gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Banyaknya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Σ penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.2	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Banyaknya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Σ pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.3	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Banyaknya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Σ koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.4	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Σ koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.5	Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Banyaknya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Σ pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.6	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Banyaknya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Σ koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Subkoor Keuangan dan Aset	-
1.2.7	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Banyaknya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Σ penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Subkoor Keuangan dan Aset	-

1,3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya	Jumlah alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya	Banyaknya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya	Σ alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya	Kasubag UP	-
1.3.1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya penyediaan komponen instalasi	Jumlah penyediaan komponen instalasi	Banyaknya penyediaan komponen instalasi	Σ penyediaan komponen instalasi	Kasubag UP	-
1.3.2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Σ penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kasubag UP	-
1.3.3	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Σ penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kasubag UP	-
1.3.4	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Σ penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kasubag UP	-
1,4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang sesuai kebutuhan perangkat daerah	Jumlah barang sesuai kebutuhan perangkat daerah	Banyaknya barang sesuai kebutuhan perangkat daerah	Σ barang sesuai kebutuhan perangkat daerah	Kasubag UP	-
1.4.1	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Banyaknya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Σ pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kasubag UP	-
1,5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Banyaknya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Σ kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag UP	-
1.5.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Σ penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kasubag UP	-
1.5.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Σ penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kasubag UP	-
1,6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Banyaknya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Σ barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag UP	-
1.6.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Banyaknya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Σ penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kasubag UP	-

2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan				Kepala Bidang P2, Kesmas, Yankes dan SDK	
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Σ fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Kepala Bidang P2, Kesmas, Yankes dan SDK	
2.1.1	Subkegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Banyaknya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Σ pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Kepala Bidang SDK	
2.1.2	Subkegiatan Pengembangan Puskesmas	Terpenuhinya pengembangan puskesmas	Jumlah pengembangan puskesmas	Banyaknya pengembangan puskesmas	Σ pengembangan puskesmas	Subkoord Alkes dan PKRT	
2.1.3	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Banyaknya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Σ rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Subkoord Alkes dan PKRT	
2.1.4	Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Banyaknya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Σ pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Subkoord Alkes dan PKRT	
2.1.5	Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Banyaknya pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Σ pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Subkoord Alkes dan PKRT	
2.1.6	Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Banyaknya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Σ pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Subkoord Alkes dan PKRT	
2.1.7	Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Banyaknya pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Σ pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Subkoord Kefarmasian	
2.1.8	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terpenuhinya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Subkoord Yankes Primer	

2.1.9	Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Banyaknya distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Σ distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	Subkoord Kefarmasian	
2.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Banyaknya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Σ pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Subkoord Yankes Rujukan	
2.2.1	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Subkoord KGM	
2.2.2	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Subkoord KGM	
2.2.3	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Subkoord KGM	
2.2.4	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Subkoord KGM	
2.2.5	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Subkoord KGM	
2.2.6	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Subkoord KGM	
2.2.7	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Subkoord KGM	
2.2.8	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Subkoor PTM	
2.2.9	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Subkoor PTM	
2.2.10	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Subkoor PTM	

2.2.11	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Subkoord P2PM	
2.2.12	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Subkoord P2PM	
2.2.13	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Subkoord Survim	
2.2.14	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Subkoord KGM	
2.2.15	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Subkoor Kesing dan Kesjaor	
2.2.16	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Subkoor Kesing dan Kesjaor	
2.2.17	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Banyaknya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Σ pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Subkoord Promkes	
2.2.18	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Subkoord Kestrak	
2.2.19	Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah pengelolaan surveilans kesehatan	Banyaknya pengelolaan surveilans kesehatan	Σ pengelolaan surveilans kesehatan	Subkoord Survim	
2.2.20	Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Subkoord PTM	
2.2.21	Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Banyaknya pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Σ pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Subkoord Yankes Rujukan	
2.2.22	Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Banyaknya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Σ pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Subkoord P2PM	

2.2.23	Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Banyaknya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Σ pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Subkoord Yankes Primer	
2.2.24	Subkegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	Banyaknya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	Σ pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	Subkoord Survim	
2.2.25	Subkegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Jumlah penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Banyaknya penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Σ penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Subkoord Kesling dan Kesjaor	
2.2.26	Subkegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya operasional pelayanan puskesmas	Jumlah operasional pelayanan puskesmas	Banyaknya operasional pelayanan puskesmas	Σ operasional pelayanan puskesmas	Subkoord Yankes Primer	
2.2.27	Subkegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Banyaknya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Σ operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Subkoord Yankes Primer	
2.2.28	Subkegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Banyaknya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Σ pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Subkoord Survim	
2.2.29	Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Σ pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Subkoord P2PM	
2.2.30	Subkegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Banyaknya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Σ pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Subkoord KGM	
2,3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terkelolanya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Banyaknya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Σ sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Subkoord PPEP	
2.3.1	Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	Banyaknya pengelolaan sistem informasi kesehatan	Σ pengelolaan sistem informasi kesehatan	Subkoord PPEP	
2,4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Banyaknya pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Σ pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Subkoord Yankes Primer	
2.4.1	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Σ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Subkoord Yankes Primer	

2.4.2	Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Banyaknya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Σ peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Subkoord Yankes Primer	
3	Program Sediaan Farmasil, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman				Kepala Bidang SDK	
3.1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Banyaknya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Σ pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Subkoor Kefarmasian	
3.1.1	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Σ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Subkoor Kefarmasian	
3.2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Banyaknya penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Σ penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Subkoor Kefarmasian	
3.2.1	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah	Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah	Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah	Σ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah	Subkoor Kefarmasian	

3,3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Jumlah penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Banyaknya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	\sum penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Subkoor Kefarmasian	
3.3.1	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	\sum pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Subkoor Kefarmasian	
3,4	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Banyaknya penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	\sum penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Subkoor Kefarmasian	
3.4.1	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	\sum pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Subkoor Kefarmasian	
3,5	Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Banyaknya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	\sum pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Subkoor Kefarmasian	
3.5.1	Subkegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Banyaknya pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	\sum pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Subkoor Kefarmasian	

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Jumlah mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Banyaknya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Σ mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Kepala Bidang SDK	
4,1	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Jumlah pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Banyaknya pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Σ pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	Subkoord SDMK	
4.1.1	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Banyaknya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Σ pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Subkoord SDMK	
4,2	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Jumlah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Banyaknya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Σ perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Subkoord SDMK	
4.2.1	Subkegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Banyaknya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Σ perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Subkoord SDMK	
4,2,2	Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Banyaknya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Σ pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Subkoord SDMK	
4.2.3	Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Banyaknya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Σ pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan		
4,3	Kegiatan Kembangkan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Banyaknya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Σ pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Subkoord SDMK	
4.3.1	Subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Banyaknya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Σ pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Subkoord SDMK	

5	Program Pem berdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	Jumlah kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	Banyaknya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	Σ kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Kesmas	
5,1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah kabupaten/ kota	Banyaknya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah kabupaten/ kota	Σ advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah kabupaten/ kota	Subkoord Promkes	
5.1.1	Subkegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Banyaknya peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Σ peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Subkoord Promkes	
5.1.2	Subkegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Terlaksananya teknologi tepat guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah teknologi tepat guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Banyaknya teknologi tepat guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Σ teknologi tepat guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Subkoord Kesling dan Kesjaor	
5,2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Banyaknya kegiatan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Σ kegiatan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Subkoord Promkes	
5.2.1	Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Banyaknya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Σ penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Subkoord Promkes	
5,3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota	Banyaknya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota	Σ pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota	Subkoord Promkes	
5.3.1	Subkegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Banyaknya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Σ bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Subkoord Promkes	

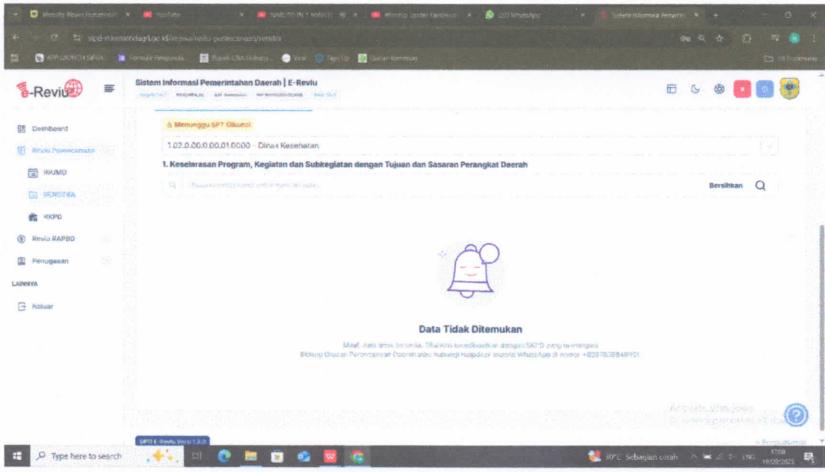
Inspektorat Bondowoso

Disusun Oleh : Zikri Assyura, S.T.
Tanggal : 15 September 2025
Direviu : Zikri Assyura, S.T.
Tanggal : 15 September 2025
Disetujui Oleh : Fenny Soegiarti, S.E.
Tanggal : 15 September 2025

**CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2025 - 2029**

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1 / 191 / DD / 430.8 / 2025 tanggal 1 September 2025 atas kegiatan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 - 2029, dapat disampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

1. Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	<p><i>Error System</i></p>  <p>Data Tidak Ditemukan</p> <p>Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang anda alami. Silakan kembali lagi dengan sistem yang lebih baik.</p>	<i>Error System</i>

2. Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Telah Selaras	Telah Selaras

3. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Telah Selaras	Telah Selaras

4. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Telah Selaras	Telah Selaras

5. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	<p>Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja masih belum disajikan dengan jelas baik pada aplikasi maupun pada fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah, diantaranya terdapat pada IKU berikut :</p> <p>Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup</p> <p>Angka Kematian Ibu (AKI)</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Cakupan imunisasi bayi lengkap</p> <p>Cakupan kepesertaan jaminan</p>	<p>Menyajikan Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja pada Aplikasi dan Fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah</p>

	<p>kesehatan nasional (JKN)</p> <p>Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan</p> <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita</p> <p>Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis</p> <p>Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna</p> <p>Angka Kematian Balita</p> <p>Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)</p> <p>Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna</p>	
--	---	--

6. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

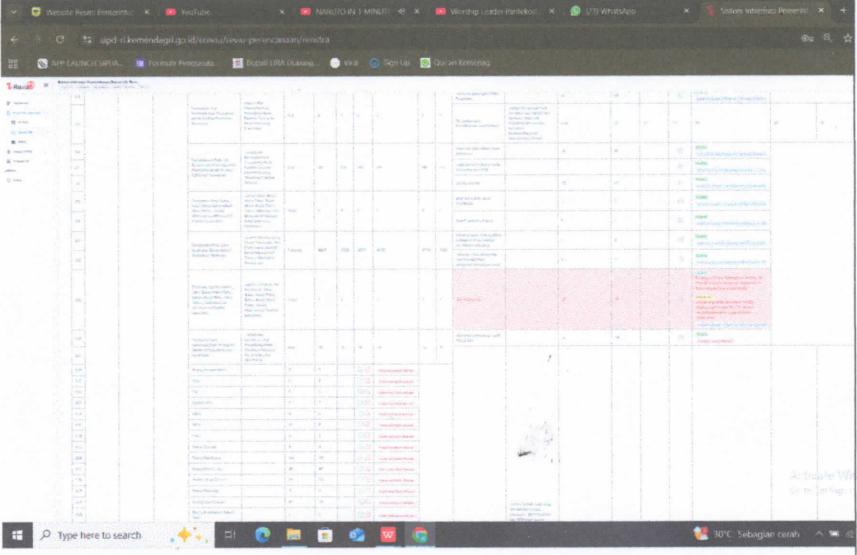
No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	<p>Data Target Tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja Periode Tahun Sebelumnya masih belum disajikan dengan jelas, baik pada aplikasi SIPD maupun pada fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah :</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p>	<p>Menyajikan Data Target tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja Periode tahun Sebelumnya pada Aplikasi SIPD dan Fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah</p>

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	<p>Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun</p> <p>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Cakupan penemuan kasus TB</p> <p>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun</p> <p>Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>Persentase Laporan Keuangan yang disusun</p> <p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah</p> <p>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional</p> <p>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)</p> <p>Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu</p> <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan</p> <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan</p>	

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	<p>sesuai standar</p> <p>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</p> <p>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar</p> <p>Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun</p> <p>Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan</p> <p>Presentase lanjut usia yang mandiri</p> <p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan</p> <p>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi</p> <p>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan</p> <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Persentase Desa/Kelurahan sanitasi</p>	

No	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	<p>total berbasis masyarakat</p> <p>Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat</p> <p>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi</p> <p>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun</p> <p>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</p> <p>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar</p> <p>Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> <p>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> <p>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> <p>Persentase Laporan Keuangan yang disusun (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p>	

7. Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

N o	Catatan Hasil Reviu	Rekomend asi
1.	<p><i>Error System</i></p> 	<i>Error System</i>

Demikian untuk mendapat perhatian dan diharap agar menyampaikan tanggapan segera setelah disampaikannya Catatan Hasil Reviu ini.

Bondowoso, 15 September 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso,



Pengendali Teknis Tim Reviu,

Fenny Soegiarti, S.E.
Pembina Y IVb
NIP 19790426 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 13, Bondowoso, Jawa Timur
Telepon (0332) 421341, Laman dinkesbondowosokab.go.id, Pos-el dinkes@bondowosokab.go.id

Bondowoso, 26 September 2025

Nomor : 000.7.3/ ~~AD36~~ /430.9.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindaklanjut hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso 2025 - 2029

Yth : Inspektur Kabupaten Bondowoso
di
Bondowoso

Menindaklanjuti catatan hasil reviu Rancangan Akhir Renstra pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

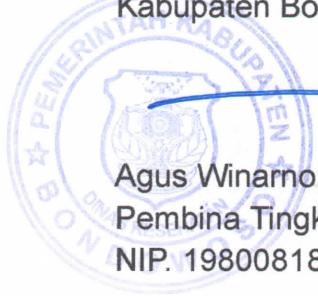
1. Catatan hasil reviu nomor 1 Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan error system sudah dikoordinasikan dengan BP4D untuk perbaikan.
2. Catatan hasil reviu nomor 5 Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode sebelumnya terhadap capaian tahun terakhir, Prosentase capaian kinerja masih belum disajikan dengan jelas baik di aplikasi maupun dokumen fisiknya diantaranya Proporsi aktivitas penduduk dengan aktivitas fisik cukup, AKI, Nilai Sakip, Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap, Cakupan Kepesertaan JKN, Persentase peningkatan kompetensi SDM Kesehatan, Persentase penderita HT mendapatkan layanan sesuai standar, Prevalensi stunting, Persentase pemeriksaan gratis, Persentase sediaan farmasi, Alkes dan Makmin, IKM, Persentase RS dengan akreditasi paripurna, Angka kematian balita, Angka keberhasilan pengobatan TB dan Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna telah diperbaiki di dokumen Renstra Dinkes dan Aplikasi SIPD.
3. Catatan hasil reviu nomor 6 Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya terhadap Data target dan capaian tahun terakhir, dan Persentase capaian kinerja periode tahun sebelumnya masih belum disajikan dengan jelas baik di SIPD dan dokumen fisik Renstra diantaranya : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, Persentase orang terduga TBC

mendapatkan pelayanan sesuai standar, Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun, Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase lansia yang mandiri, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Tingkat kepuasan pasien terhadapa layanan kesehatan, Persentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, Rasio tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar, Pesentase masyarakat bidang kesehatan yang diperdayakan, Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan, Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat, Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi, Persentase merokok penduduk 10 -21 tahun, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persenatse penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar, Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar, Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (RSUD dr koesnadi), Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun (RSUD dr koesnadi), Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi (RSUD dr koesnadi), Persentase laporan keuangan yang disusun (RSUD dr koesnadi), Prevalensi depresi dibawah umur 15 tahun, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, Cakupan penemuan kasus TB, Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun, Cakupan kepesertaan aktif JKN, Persentase laporan keuangan yang disusun, Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari linsek yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional, Cakupan kepesertaan JKN, Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang dengan usia 15 – 50 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan. Telah diperbaiki di dokumen Renstra dan di SIPD.

4. Catatan hasil reviu nomor 7 Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah dengan error system di aplikasi telah ditindaklanjuti dengan BP4D.

Demikian untuk menjadi periksa atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso



Agus Winarno, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800818 200312 1 002